

LAPORAN AKHIR

MEMPROMOSIKAN
PERAN DAN KONTRIBUSI
MASYARAKAT SIPIL
MELALUI PEMANFAATAN
INDEKS MASYARAKAT SIPIL

2012

DIBUAT OLEH:

YAPPIKA (ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI)
JALAN PEDATI RAYA No. 20 RT 007/09 JAKARTA TIMUR

Australian Community Development and Civil Society
Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II



DAFTAR ISI

A. PENGANTAR	1
B. METODOLOGI	2
C. CAPAIAN UTAMA	7
D. ANALISIS HASIL IMS DI 16 DAERAH	
1. Dimensi Struktur	11
2. Dimensi Lingkungan	16
3. Dimensi Nilai.....	21
4. Dimensi Dampak	23
E. IMS DAN UPAYA PENCAPAIAN TKLD	26
F. RINGKASAN ANALISIS 8 INDIKATOR	
YANG BERELASI DENGAN KERJA-KERJA ACCESS	30
1. Aksi kolektif komunitas (<i>collective community action</i>)	30
2. Kerja sama antar aktor MS (<i>cooperation</i>)	31
3. Dialog negara dan MS (<i>dialogue</i>)	32
4. Kerja sama (Collaboration)	33
5. Aksi-aksi MS mempromosikan transparansi	
(CS actions to promote transparency)	35
6. Aksi-aksi MS untuk mempromosikan kesetaraan gender	
(CS actions to promote gender equity)	36
7. Pengaruh MS dalam kebijakan publik	
(Influencing Public Policy)	37
8. Memberdayakan perempuan (<i>empowering women</i>)	38
G. REFLEKSI DAN PEMBELAJARAN PEMANFAATAN IMS	39
H. REKOMENDASI	40

Membangun pemerintahan yang maju tidak dapat diabaikan dari peran masyarakat sipil sebagai bagian utama dari sistem tata pemerintahan lokal yang baik (*local good governance*).

Paul Boon – Direktur Program ACCESS Tahap II

Salah satu tantangan utama bagi semua negara demokrasi adalah bagaimana memelihara keberlanjutan organisasi masyarakat sipilnya, yakni dengan mengoreksi keadaan warisan yang akut pada perimbangan antara kekuatan negara dan masyarakat.

Dr. Raden Siliwanti MPIA - Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS RI

A. PENGANTAR

Pengukuran Indeks Masyarakat Sipil (IMS) 2012 telah berhasil dilaksanakan di enam belas wilayah kerja ACCESS Tahap II. Wilayah kerja tersebut meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, dan Dompu (Provinsi NTB); Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, dan Timur Tengah Selatan (Provinsi NTT); Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng (Provinsi Sulawesi Selatan); Kabupaten Buton Utara, Muna, Buton, dan Kota Baubau (Provinsi Sulawesi Tenggara). Pengukuran IMS 2012 merupakan pengukuran status IMS yang memperbandingkan antara situasi masyarakat sipil yang diperoleh pada tahun 2009 dengan 2012. Oleh karena itu secara metodologi tidak jauh berbeda antara pengukuran IMS 2012 dengan IMS 2009. Manajemen pengelolaan kegiatan ini pun tidak jauh berbeda. Yappika berperan pada bidang koordinasi baik fasilitator dan substansi, yang kemudian melibatkan mitra kerja di kabupaten/kota baik sebagai fasilitator ataupun sebagai *host* pada saat penyelenggaraan lokakarya pengukurannya.

Kegiatan ini seluruhnya mendapat dukungan penuh baik dari tim ACCESS di tiap provinsi, mitra ACCESS, peneliti Yappika, asosiasi fasilitator Yappika maupun pemerintah daerah di 16 kabupaten/kota tersebut. Dukungan ini diberikan pada setiap tahapan pengukuran IMS mulai dari penggalian data sekunder, pemetaan OMS, lokakarya pengukurannya hingga tersaji laporan komprehensif atas seluruh kegiatan pengukuran di 16 kabupaten/kota ini.

Laporan ini terdiri atas kumpulan laporan-laporan yang dibuat oleh fasilitator di masing-masing daerah dan analisis umum atas keseluruhan hasil-hasil yang diperoleh dari 16 kabupaten/kota. Adapun sistematika pelaporannya sebagai berikut. Pada bagian awal akan disampaikan mengenai konsep dan metodologi yang digunakan pada pengukuran IMS 2012. Pada bagian selanjutnya akan disampaikan mengenai analisis tingkat kesehatan masyarakat sipil tahun 2012 yang bersumber dari hasil-hasil yang diperoleh dari seluruh rangkaian kegiatan pengukuran. Selanjutnya diulas mengenai refleksi dan pembelajaran atas penyelenggaraan pengukuran IMS dalam konteks tata pemerintahan lokal yang demokratis (TKLD). Di akhir laporan akan disampaikan kesimpulan dan rekomendasi Yappika atas seluruh kegiatan pengukuran ini.

B. METODOLOGI

(1) Tujuan dan Hasil

Kegiatan pengukuran IMS 2012 bertujuan untuk memetakan dinamika masyarakat sipil ditinjau dari peran dan kontribusinya terhadap penguatan internal masyarakat sipil serta tata kepengemertahan lokal demokratis. Dalam rangka memetakan dinamika masyarakat sipil, kegiatan ini mengarahkan hasilnya pada empat hal:

- Mendapatkan gambaran TKLD berdasarkan empat dimensi Indeks Masyarakat Sipil (termasuk 8 indikator ACCESS) serta peran dan kontribusi masyarakat sipil dalam pencapaian TKLD di tingkat kabupaten.
- Mendapatkan gambaran mengenai arena masyarakat sipil yang menjadi dasar bagi kerja-kerja advokasi pada semua tingkat (desa, kecamatan, kabupaten/kota).
- Mempromosikan peran dan kontribusi masyarakat sipil dalam pencapaian TKLD.
- Memperoleh rekomendasi kepada para pihak untuk mendorong optimalisasi kontribusi masyarakat sipil.

(2) Konsep Pengukuran

Konsep yang digunakan dalam pengukuran IMS 2012 adalah konsep yang digunakan pada pengukuran IMS 2009. Konsep yang digunakan untuk pengukuran IMS mengadopsi *instrument* CIVICUS yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia¹. Indeks Masyarakat Sipil pada dasarnya adalah sebuah alat untuk melakukan penilaian kebutuhan dan menyusun rencana aksi secara partisipatif, dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan dan momentum bagi inisiatif penguatan masyarakat sipil. Konsep yang digunakan oleh Yappika dalam publikasi CIVICUS disebut sebagai IMS Klasik (*Classic CSI*).²

Tabel di bawah ini memuat beberapa perbandingan beberapa aspek dalam pengukuran IMS antara pengukuran tahun 2012 dan tahun 2009.

PENGUKURAN IMS 2012 DAN 2009

Aspek	Pengukuran IMS 2012	Pengukuran IMS 2009
Konsep MS	Menggunakan definisi MS versi IMS 2009	Menggunakan definisi MS versi CIVICUS yang diadaptasi sesuai konteks daerah.
Indikator IMS	Menggunakan indikator IMS yang digunakan pada pengukuran IMS 2009	Berbasis pada indikator CIVICUS namun telah diadaptasikan diadaptasi sesuai dengan kabupaten/kota masing-masing.
Wilayah Pengukuran	Sulsel: Jeneponto, Bantaeng, Gowa, Takalar Sultra: Muna, Buton, Baubau, Buton Utara NTB: Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Dompu NTT: Kupang, TTS, Sumba Barat	Sulsel: Jeneponto, Bantaeng, Gowa, Takalar Sultra: Muna, Buton, Baubau, Buton Utara NTB: Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Dompu NTT: Kupang, TTS, Sumba Barat

¹ Suryaningati, Abdi (2012). "Menilai Status Masyarakat Sipil: Sebuah Panduan Memahami Indeks Masyarakat Sipil 2012". Yappika. Jakarta.

² Civicus.org

	dan Sumba Timur	dan Sumba Timur
Rangkaian Kegiatan	1) Penelitian dan pemetaan OMS 2) Refresh alat IMS 3) Lokakarya pengukuran IMS di 16 kabupaten/kota (meliputi kabupaten lama dan baru).	1) Kaji ulang IMS di 8 Kabupaten lama ³ . 2) Penelitian dan pemetaan OMS di kabupaten/kota baru ⁴ . 3) Kaji ulang alat IMS untuk kabupaten baru. 4) Pengukuran IMS di 8 kabupaten baru.
Kepesertaan	Mempertimbangkan sebaran wilayah administratif, variasi spektrum OMS, dan keseimbangan gender.	Mempertimbangkan sebaran wilayah administratif, variasi spektrum OMS, dan keseimbangan gender.
Tindak lanjut	Agenda aksi disusun sendiri oleh para pihak yang menjadi peserta lokakarya pengukuran.	Rekomendasi disusun oleh para pihak dengan difasilitasi oleh fasilitator.
Pelaksana	Yappika + OMS Kabupaten	Yappika + OMS Kabupaten
Fasilitator	Fasilitator daerah menjadi fasilitator utama	Yappika menjadi fasilitator utama

(3) Instrumen Pengukuran

Definisi masyarakat sipil adalah “sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, dimana orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama”. CIVICUS membagi arena ini dalam empat dimensi yaitu dimensi *struktur*, *lingkungan*, *nilai* dan *dampak*. Setiap dimensi terdiri dari subdimensi dan indikator. Dalam pengukuran Indeks Masyarakat Sipil, pertama kali yang perlu disepakati adalah *instrument* indeks masyarakat sipil terlebih dahulu. Meskipun *instrument* IMS telah ditetapkan berdasar dasar dari CIVICUS namun masih perlu dianalisa kembali kesesuaian *instrument* ini dengan konteks yang berkembang saat ini. Hal ini untuk memudahkan bagi peneliti dan fasilitator untuk memahami lebih jelas *instrument* yang akan digunakan untuk mengukur. Hasil kesepakatan atas *instrument* dapat dilihat dalam lampiran. *Instrument* ini kemudian dimanfaatkan dalam penelitian, pemetaan OMS maupun saat melakukan lokakarya pengukuran IMS.

(4) Tahapan Pengukuran

Studi Dokumen

Studi dokumen bertujuan untuk mengumpulkan data-data di wilayah pengukuran IMS 2012 terkait kondisi masyarakat sipil menggunakan *instrument* IMS. Data dan informasi tersebut dijadikan basis penilaian dalam lokakarya IMS 2012. Hasil yang diperoleh melalui studi dokumen ini adalah data dan informasi mengenai masyarakat sipil berdasarkan indikator-indikator dalam 4 dimensi IMS yaitu struktur, lingkungan, nilai dan dampak. Selain itu diperoleh juga gambaran mengenai kondisi umum kabupaten mencakup jumlah penduduk (L/P), mata pencaharian, kantong-kantong kemiskinan,

³ Kabupaten lama yang dimaksud adalah wilayah kerja ACCESS yang sudah dilakukan pengukuran IMS sejak tahun 2007, meliputi Bantaeng, Jeneponto, Buton, Muna, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumba Barat dan Sumba Timur.

⁴ Kabupaten baru yang dimaksud adalah wilayah kerja ACCESS yang belum dilakukan pengukuran IMS dan relatif baru didampingin oleh program ACCESS Tahap II, meliputi Gowa, Takalar, Baubau, Buton Utara, Bima, Dompu, Kupang dan TTS.

jumlah kecamatan (rural/urban) dan sebagainya. Sumber data studi dokumen sebagian besar menggunakan dokumen ACCESS Tahap II, baik dari laporan program (*progress partner review*), Studi Stock Taking Pelayanan Publik, BPS dan lain sebagainya. Hasil studi dokumen di masing-masing daerah secara terperinci dapat dilihat dalam lampiran.

Pemetaan OMS

Pemetaan kekuatan sosial merupakan bagian dalam pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan dalam bentuk workshop selama 2 hari di 16 kabupaten/kota. Kegiatan Pemetaan OMS ini bertujuan untuk membuat dua peta visual tentang aktor (OMS) yang berpengaruh di kabupaten/kota. Hasil yang diperoleh pada kegiatan pemetaan ini adalah adanya identifikasi mengenai relasi antar aktor masyarakat sipil dan identifikasi kekuatan OMS dalam mempengaruhi kebijakan publik di berbagai tingkatan (desa/kelurahan hingga kabupaten/kota). Identifikasi dalam bentuk visual dapat dilihat dalam lampiran.

Refresh Alat IMS

Bila pada pengukuran IMS 2009 disebut sebagai kaji alat IMS maka pada pengukuran IMS 2012 disebut sebagai refresh alat IMS. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa pengukuran 2012 tidak mengubah *instrument* atau alat IMS agar dapat membedakan gambaran hasil IMS 2009 dengan IMS 2012. Refresh alat IMS bertujuan: pertama, menyegarkan kembali pemahaman fasilitator atas konsep dan tool IMS yang akan digunakan pada Lokakarya IMS 2012; Kedua menyamakan persepsi bagi fasilitator dan panitia lokakarya atas alur/proses lokakarya; dan ketiga pembagian peran dan tanggung jawab, kebutuhan lokakarya serta waktu pelaksanaan di setiap kabupaten. Kegiatan diselenggarakan pada 3 – 6 September 2012 yang diikuti oleh 18 fasilitator daerah, 8 fasilitator nasional, 16 panitia daerah dan perwakilan ACCESS. Secara umum kegiatan ini berjalan baik, dalam arti semua pihak berkontribusi aktif pada kegiatan secara penuh baik dalam sesi materi maupun mendiskusikan strategi-strategi fasilitasi yang baru. Faktor pendukungnya adalah peserta sebagian besar adalah orang-orang yang pernah terlibat dalam lokakarya IMS 2009 sehingga proses kegiatan berjalan dengan baik.

Lokakarya Pengukuran

Pelaksanaan Lokakarya pengukuran IMS 2012 dibagi menjadi dua tahapan kegiatan: (1) lokakarya komunitas dan (2) lokakarya penilaian. Lokakarya komunitas merupakan lokakarya yang diikuti hanya oleh komunitas. Lokakarya ini dilakukan pada hari pertama dengan jumlah peserta 15-20 orang dari beberapa desa. Peserta ini selanjutnya akan mengikuti lokakarya penilaian. Mereka dipilih dari orang yang cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di wilayahnya, meliputi desa hingga kecamatan, atau bisa juga kabupaten/kota.

Lokakarya komunitas bertujuan tiga hal. Pertama memperkenalkan *instrument* IMS yang akan digunakan pada lokakarya penilaian kepada komunitas. Kedua menambah informasi mengenai situasi masyarakat sipil dengan menggali secara singkat beberapa subdimensi. Ketiga untuk membekali peserta dengan gagasan lokakarya serta konsep dan alat IMS agar terjadi pengetahuan yang seimbang atas konsep dan alat yang digunakan pada saat lokakarya penilaian.

Tahap kedua yaitu lokakarya penilaian. Lokakarya penilaian diawali dengan seminar mengenai hasil temuan penelitian (dari hasil data-data sekunder kabupaten/kota), hasil evaluasi sesuai indikator/subdimensi IMS, dan kondisi sosial-ekonomi-politik lokal. Kemudian dilanjutkan dengan sesi refresh IMS dan penilaian IMS. Pengolahan lembar penilaian peserta akan dilakukan pada hari yang sama (malam hari) dan telah siap dalam bentuk hardcopy untuk masing-masing peserta dan dalam bentuk visual yang dipasang di ruangan pertemuan pada hari berikutnya. Sesi dilanjutkan dengan interpretasi skor intan IMS yang kedua dengan cara membandingkannya dengan skor IMS sebelumnya. Rekomendasi dihasilkan pada akhir setiap pembahasan sub-dimensi yang akan menyentuh kerja-kerja para pihak selanjutnya seperti pemerintah, OMS dan warga.

Peserta lokakarya di masing-masing kabupaten/kota sebanyak 50 orang (lebih kurang) yang berasal dari komunitas, OMS, Pemerintah (Kabupaten, Kecamatan, Desa), DPRD, Sektor swasta, Perguruan Tinggi/ahli setempat, Jurnalis, Donor/NGO internasional. Waktu lokakarya pengukuran IMS 2012 di 16 kabupaten/kota dilakukan sepanjang Bulan September dan Oktober 2012. Adapun jadwal dan fasilitator yang terlibat sebagai berikut:

Jadwal dan Fasilitator Lokakarya Penilaian IMS 2012

No.	Wilayah	Waktu	Fasilitator
1.	Kabupaten TTS	01 – 05 Oktober 2012	Sri Indiyastutik Vincentius Bureni Oky Laisnima Libby Sinlaloe
2.	Kabupaten Kupang	24 – 28September 2012	Sri Indiyastutik Vincentius Bureni Oky Laisnima Libby Sinlaloe
3.	Kabupaten Sumba Barat	24 – 28September 2012	Rony Malelak Wenda Radjah Redempta Bato Rambu Ninu
4.	Kabupaten Sumba Timur	01 – 05 Oktober 2012	Rony Malelak Wenda Radjah Redempta Bato Rambu Ninu
5.	Kabupaten Bima	01 – 05 Oktober 2012	Wahyudi Safriatna Tri Buana TD Evi Susanti
6.	Kabupaten Dompu	24 – 28September 2012	Wahyudi Safriatna Tri Buana TD Evi Susanti
7.	Kabupaten Lombok Tengah	01 – 05 Oktober 2012	Abdi Suryaningati Dian Aryani Rahmayati Suhaemi
8.	Kabupaten Lombok Barat	24 – 28September 2012	Abdi Suryaningati Dian Aryani

			Rahmayati Suhaemi
9.	Kabupaten Buton Utara	17 – 21 September 2012	Ahmad Yani Rulia Payman Yustina Fendrita C Hakim
10.	Kabupaten Baubau	18 – 22 September 2012	Fransisca Fitri Farida K. Irham Pijais Jafar
11.	Kabupaten Buton	24 – 28 September 2012	Fransisca Fitri Jafar Irham Pinjais Farida K.
12.	Kabupaten Muna	24 – 28 September 2012	Ahmad Yani Rulia Payman Yustina Fendrita C Hakim
13.	Kabupaten Bantaeng	25 – 29 September 2012	Firman Mujahid Khaerullah Lodji Suryani Hajar Nuzuliah Hidayah Asriyudi
14.	Kabupaten Jeneponto	01 – 05 Oktober 2012	Firman Mujahid Khaerullah Lodji Suryani Hajar Nuzuliah Hidayah Asriyudi
15.	Kabupaten Takalar	01 – 05 Oktober 2012	Ajeng K. Ningrum Kaharuddin Muji Husain Mabe Nurlia Ruma
16.	Kabupaten Gowa	24 – 28 September 2012	Ajeng K. Ningrum Kaharuddin Muji Husain Mabe Nurlia Ruma

Refleksi Fasilitator

Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah: (1) adanya pembelajaran penting tentang status perkembangan MS antara tahun 2009 dan 2012; (2) adanya pembelajaran atas instrumen (IMS) dan prosesnya; dan (3) adanya pembelajaran atas mekanisme kerja sama antara Yappika, panitia daerah, fasilitator nasional dan fasilitator daerah. Peserta pertemuan ini adalah fasilitator nasional dan perwakilan dari fasilitator daerah. Fasilitator daerah yang diundang sedapat mungkin dapat memberikan pandangan yang mencerminkan situasi yang terjadi di kabupatennya masing-masing.

C. CAPAIAN UTAMA

Terdapat sekurangnya 3 capaian utama dari kegiatan Lokakarya IMS 2012 di 16 kabupaten (wilayah kerja ACCESS Tahap II), yang akan dijelaskan berikut ini.

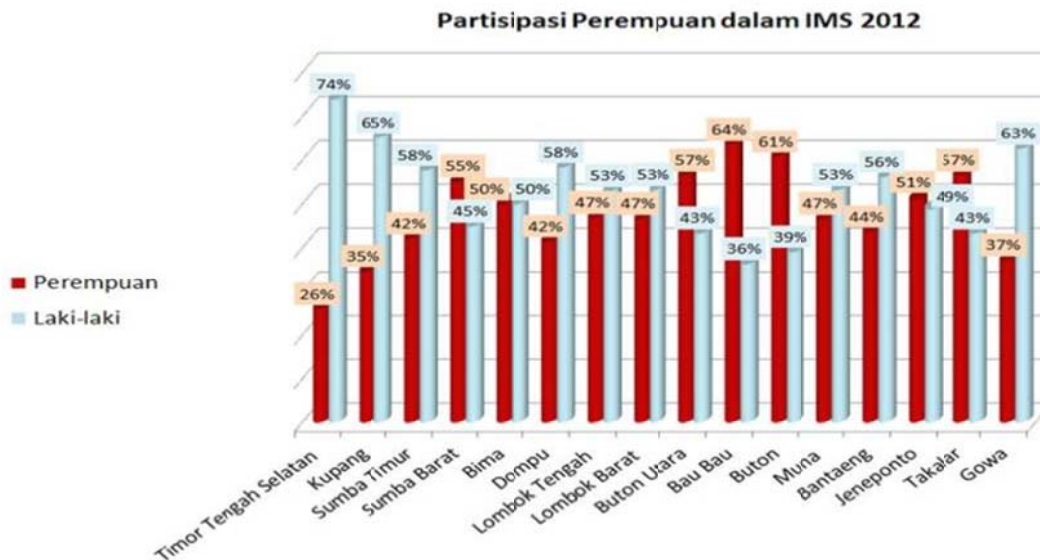
Diperolehnya status terkini mengenai tingkat kesehatan masyarakat sipil di 16 wilayah kerja ACCESS Tahap II. Status terkini yang dimaksud adalah berbagai capaian perkembangan yang merupakan hasil kerja dari OMS di berbagai level di wilayah kabupaten/kota. Pertama adalah capaian dalam dimensi struktur yang menunjukkan perkembangan modal sosial di tingkat warga dalam bentuk keaktifan dalam partisipasi sosial dan politik non partisan; jalinan komunikasi dan interrelasi; serta perkembangan sumber daya pendukung keberlanjutan. Kedua adalah capaian dalam Dimensi Lingkungan pendukung masyarakat sipil. Lingkungan pendukung ini merupakan gambaran dari kondisi pemenuhan hak sipil politik serta ekosob; desentralisasi hingga ke tingkat desa; konteks sosial budaya; serta relasi antara negara dengan masyarakat sipil. Berikutnya adalah capaian dalam dimensi nilai yang memperlihatkan capaian dalam praktek internal nilai dan promosinya kepada pihak-pihak lain terkait tujuan nilai-nilai universal. Terakhir adalah capaian dalam dimensi dampak yang memperlihatkan kinerja masyarakat sipil dalam mempengaruhi kebijakan publik; pemberdayaan masyarakat dan perempuan; serta mendorong tanggung jawab pemerintah dan sektor swasta. Hasil-hasil tersebut diuraikan lebih lengkap pada laporan fasilitator per kabupaten.

Adanya peningkatan pemahaman peserta dalam memahami IMS dan PAK/DCEP dalam satu kerangka agenda pemberdayaan kabupaten/kota. Pemahaman peserta akan kaitan erat IMS dengan visi dan agenda “kabupaten impian” (Hasil PAK/DCEP) agar para pihak di daerah dapat memanfaatkan hasil-hasilnya secara tepat.

Terlembagakannya proses saling berbagi informasi dan pembelajaran antar para pihak. Hal ini sesuai dengan salah satu arah strategis ACCESS yaitu “memperkuat interaksi dinamis para pihak antara masyarakat sipil dan pemerintahan”. Peserta mengakui bahwa kegiatan ini menjadi arena berbagi informasi dan pembelajaran yang bermanfaat bagi para pihak yang bekerja untuk perubahan kabupaten. Hal ini muncul di hampir semua daerah. Kenyataan ini menggembirakan karena forum-forum pertemuan tidak lagi semata-mata menjadi arena saling menuding, namun telah mulai mencair menjadi arena interaksi dinamis yang lebih produktif dan mutualis. Hal ini berdampak upaya bersama menggarap agenda pemberdayaan kabupaten yang menuntut partisipasi dan kolaborasi para pihak mulai di level desa, kecamatan, kabupaten hingga ke level lebih tinggi.

Tercapainya perimbangan laki-laki dan perempuan baik secara kuantitas maupun kualitas sebagai bentuk mendorong *gender participation*. Berdasarkan penilaian fasilitator Lokakarya IMS dari segi kuantitas, jumlah perempuan dan laki-laki cukup seimbang. Adapun perinciannya, seluruh peserta lokakarya di 16 daerah sebanyak 810 orang, dengan perincian perempuan berjumlah 383 orang (47%) dan laki-laki sebanyak 427 orang (53%). Ini artinya tercapai keseimbangan secara kuantitas antara laki-laki dan perempuan. Secara kualitas dijumpai bahwa terjadi keseimbangan antara peran perempuan dan laki-laki dalam hal pertukaran gagasan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh pandangan fasilitator yang termuat dalam laporan per kabupaten. Dalam diagram, data terpilah jumlah peserta dari seluruh kabupaten dapat dilihat sebagai berikut:

Persentase Jumlah Peserta Perempuan dan Laki-Laki Di 16 Kabupaten Dalam Lokakarya Pengukuran IMS 2012

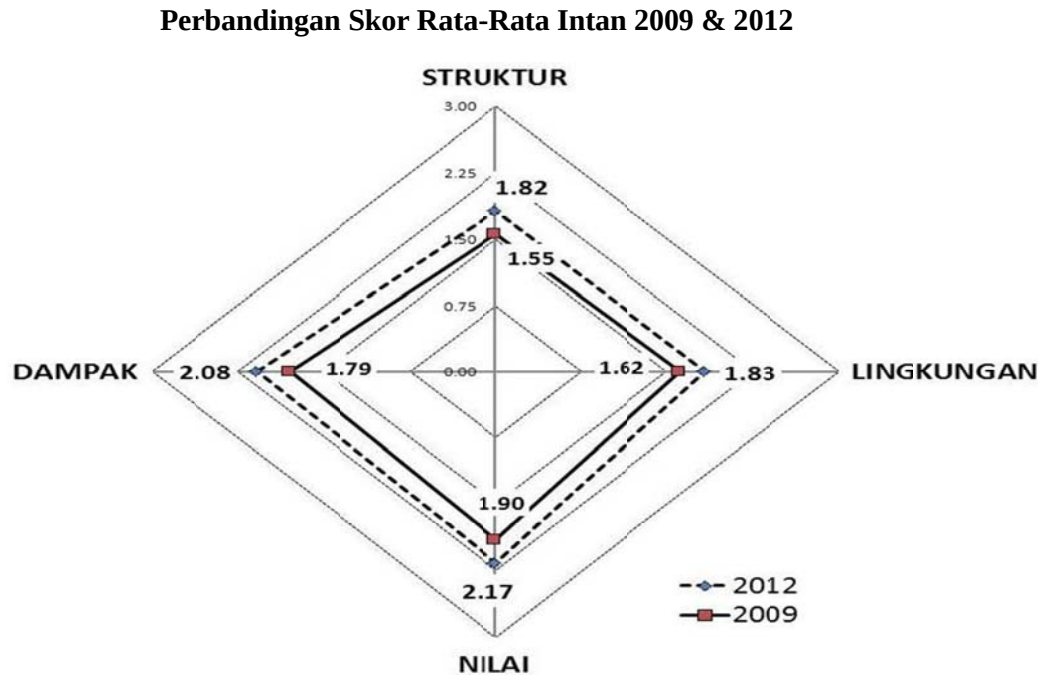


Berdasarkan catatan proses dan evaluasi lokakarya di 16 kabupaten menunjukkan terjadi peningkatan kualitas perempuan dalam menyampaikan pendapat di dalam forum. Perempuan yang umumnya lebih banyak berkiprah di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan, mampu menyampaikan pengalaman dan pendapat dengan cukup baik pada forum multistakeholder Lokakarya IMS ini. Bahkan di daerah tertentu, di mana jumlah peserta perempuan lebih banyak, fasilitator perlu memastikan kesempatan berpendapat juga diperoleh oleh peserta laki-laki.

Meningkatnya kualitas partisipasi perempuan dalam forum multistakeholder seperti lokakarya IMS ini tampaknya dikontibusi dari sejumlah pengembangan kapasitas yang diberikan kepada para perempuan. Realitas yang ditemukan hampir di semua kabupaten tersebut menjadi indikasi kerja-kerja pengarusutamaan gender dalam ACCESS Tahap II telah menghasilkan capaian.

D. ANALISIS HASIL IMS DI 16 DAERAH

Status terkini Kesehatan MS hasil IMS 2012 dan IMS 2009 di 16 wilayah kerja diperlihatkan dalam diagram dibawah ini:



Dari grafik di atas nampak bahwa secara rata-rata semua kabupaten (16 kabupaten) mengalami kenaikan di semua dimensi. Kenaikan tertinggi terjadi pada dimensi dampak (0,29), menyusul nilai (0,27), struktur (0,26) dan terendah pada lingkungan (0,21). Kenaikan ini tidak mengubah status, yakni tetap berada pada kondisi *cukup sehat*.⁵ Lihat level skor di bawah ini.

Skor	0,00 – 0,75	artinya Sakit;
Skor	0,76 – 1,50	artinya Kurang Sehat;
Skor	1,51 – 2,25	artinya Cukup Sehat;
Skor	2,26 – 3,00	artinya Sehat.

Dari 16 wilayah terlihat ada 6 wilayah yang cukup menonjol peningkatannya yaitu Buton, Takalar, Bima, Muna, Bantaeng dan Sumba Barat. Keenam wilayah ini mengalami kenaikan pada empat dimensi (struktur, lingkungan, nilai dan dampak), sehingga dapat dikatakan enam terbaik dalam konteks pengukuran IMS.

Adapun penjelasan secara terperinci atas 6 wilayah yang menonjol tersebut sebagai berikut:

⁵ Uraian di atas tidak dimaksudkan untuk membandingkan satu kabupaten dengan kabupaten lainnya karena latar belakang setiap kabupaten berbeda satu sama lain, namun uraian ini sengaja ditampilkan untuk melihat perkembangan keseluruhan dan menarik refeksi bahwa kerja-kerja untuk menyehatkan MS menunjukkan perkembangan yang semakin baik dan terjadi di semua dimensi dan seluruh wilayah kerja kerja.

- Kabupaten Buton dan Takalar: dimensi struktur dan lingkungan, meningkat cukup signifikan dari status *kurang sehat* menjadi *cukup sehat*. Sedangkan dimensi nilai dan dampak, meningkat dari kondisi *cukup sehat* menjadi *sehat*.
- Kabupaten Bima: struktur dan lingkungan, meningkat cukup signifikan dari kondisi *kurang sehat* menjadi *cukup sehat*. Sedangkan dimensi nilai dan dampak tetap berada pada kondisi *cukup sehat*.
- Kabupaten Muna: dimensi struktur, sedikit mengalami peningkatan namun berhasil memperbaiki kondisi dari *kurang sehat* menjadi *cukup sehat*.
- Kabupaten Bantaeng: Dimensi Nilai dan Dampak, meningkat cukup signifikan, dari kondisi *cukup sehat* menjadi *sehat*.
- Sumba Barat: dimensi nilai, sedikit mengalami peningkatan, namun berhasil memperbaiki status dari kondisi *cukup sehat* menjadi *sehat*. Sedangkan dimensi dampak, mengalami peningkatan cukup signifikan yakni dari status *cukup sehat* menjadi *sehat*.

Dalam tabel di bawah ini dapat diperlihatkan delta skor yang terjadi antara pengukuran tahun 2012 dan 2009.

Delta Skor IMS Tahun 2009 dan 2012 Per Dimensi

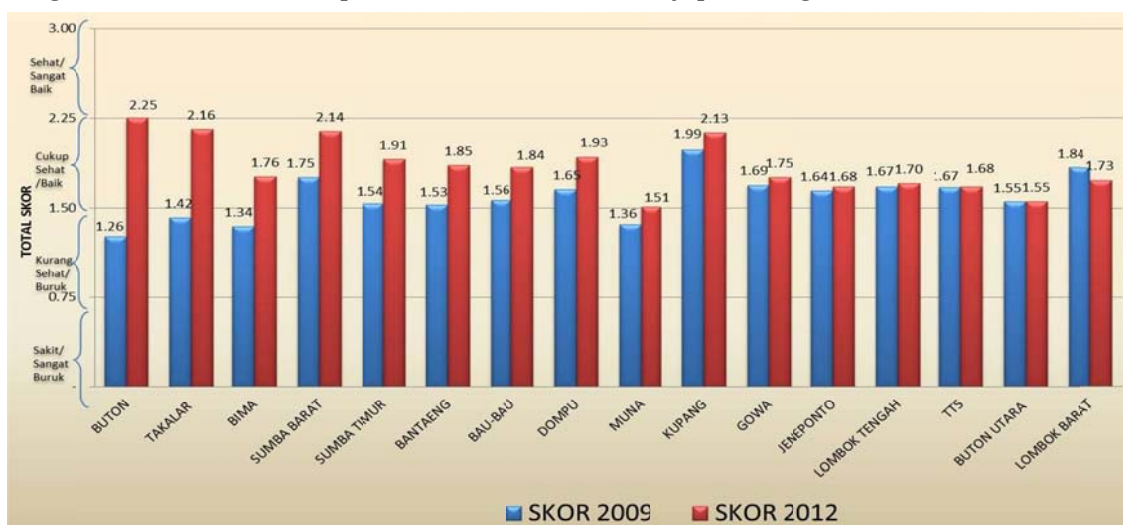
NO.	KABUPA-TEN/ KOTA	STRUKTUR			LINGKUNGAN			NILAI			DAMPAK		
		2012	2009	+/-	2012	2009	+/-	2012	2009	+/-	2012	2009	+/-
1	TTS	1,53	1,44	0,09	1,60	1,28	0,32	1,85	1,52	0,33	1,89	1,58	0,31
2	KUPANG	1,79	1,62	0,17	1,66	1,62	0,05	2,20	1,94	0,26	2,23	1,92	0,31
3	SUMBATIMUR	1,91	1,54	0,37	1,89	1,68	0,22	2,25	2,01	0,24	2,22	1,87	0,35
4	SUMBABARAT	2,14	1,75	0,39	2,18	1,83	0,35	2,51	2,23	0,28	2,40	2,00	0,39
5	BIMA	1,76	1,34	0,42	1,85	1,35	0,49	1,98	1,65	0,32	2,01	1,66	0,35
6	DOMPU	1,93	1,65	0,27	1,80	1,71	0,08	2,06	1,92	0,13	2,01	1,92	0,10
7	LOTENG	1,70	1,67	0,03	1,75	1,69	0,06	2,14	2,06	0,09	1,94	1,91	0,03
8	LOMBOKBARAT	1,73	1,84	-0,11	1,68	1,58	0,10	2,02	1,90	0,12	1,88	1,79	0,09
9	BUTON UTARA	1,55	1,55	0,00	1,67	1,76	-0,10	1,84	1,82	0,03	1,83	1,77	0,07
10	BAU-BAU	1,84	1,56	0,27	1,78	1,51	0,27	2,05	1,76	0,29	2,08	1,65	0,43
11	BUTON	2,25	1,26	0,99	2,11	1,44	0,67	2,54	1,81	0,73	2,37	1,57	0,79
12	MUNA	1,51	1,36	0,15	1,73	1,53	0,19	2,21	2,00	0,21	1,79	1,74	0,05
13	BANTAENG	1,85	1,53	0,33	2,14	1,78	0,36	2,53	2,15	0,38	2,39	1,87	0,52
14	JENEPONTO	1,68	1,64	0,04	1,67	1,83	-0,16	2,13	2,00	0,12	1,99	1,94	0,04
15	TAKALAR	2,16	1,42	0,74	1,98	1,45	0,53	2,37	1,60	0,77	2,26	1,53	0,73
16	GOWA	1,75	1,69	0,06	1,85	1,86	-0,02	2,03	2,02	0,01	2,07	1,96	0,11

Data-data di atas menunjukkan perubahan tingkat kesehatan masyarakat sipil yang beragam di 16 daerah. Data tersebut disajikan bukan untuk membandingkan atau membuat pemeringkatan antar kabupaten, akan tetapi lebih pada upaya mendapatkan gambaran dinamika MS di masing-masing kabupaten dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini (2009-2012). Dinamika MS dan perubahan tersebut terpotret dalam perolehan skor dan perubahan

status kesehatan MS. Ini menunjukkan peran dan kontribusi MS dalam memperbaiki tingkat kesehatan MS dan upaya-upaya nyata pemberdayaan daerah. Perolehan skor yang beragam pada empat dimensi IMS, menghantar peserta untuk saling berbagi pengalaman, saling membeberkan fakta, mencermati sejumlah praktik baik, dan juga sejumlah tantangan mendasar yang menuntut upaya-upaya nyata yang lebih serius dan konsisten dari semua pihak untuk pemberdayaan daerah.

I. Dimensi Struktur

Analisis dimensi struktur merupakan tinjauan atas aktor-aktor dalam arena MS, karakteristik utama dari aktor-aktor tersebut dan relasi di antara mereka. Dengan kata lain, dimensi ini berupaya mengukur kuantitas dan kualitas partisipasi para aktor MS dan perannya dalam mempengaruhi kebijakan. Dimensi ini meliputi 6 subdimensi yakni, keluasan partisipasi, kedalaman partisipasi, keragaman organisasi, tingkat organisasi, relasi antar aktor dan kecukupan sumber daya untuk mencapai visi, misi dan tujuan-tujuannya. Adapun hasil Pengukuran IMS 16 daerah pada dimensi struktur, tersaji pada diagram 3 berikut ini:



Grafik batang di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan cukup signifikan pada dimensi struktur di 6 kabupaten, yakni Kabupaten Buton, Takalar, Bima, Bantaeng, Sumba Barat dan Sumba Timur. Terdapat tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Buton, Takalar dan Bima yang telah berhasil meningkatkan perolehan skor dan sekaligus memperbaiki atau mendongkrak status kesehatan MS, dari kondisi *cukup sehat* menjadi *sehat*. Tiga kabupaten lainnya yaitu Bantaeng, Sumba Barat, dan Sumba Timur juga mengalami peningkatan namun statusnya relatif tetap sama dengan kondisi tahun 2009, yaitu *cukup sehat*. Kabupaten Muna berhasil mengubah status dari kurang sehat, menjadi cukup sehat meskipun hanya sedikit mengalami peningkatan (0,15).

Dari grafik di atas nampak pula, bahwa secara umum, hampir semua kabupaten mengalami peningkatan rata-rata skor pada dimensi struktur, kecuali Lombok Barat, dari skor 1,84 (tahun 2009) turun menjadi 1,73 (tahun 2012). Penurunan di Lombok Barat terjadi karena merosotnya perolehan skor pada tiga subdimensi yakni interelasi/relasi antar aktor-aktor MS (-0,60), tingkat organisasi (-0,16) dan keragaman arena OMS (-0,13), sementara tiga subdimensi lainnya mengalami peningkatan yaitu keluasan partisipasi, kedalaman partisipasi dan Sumber daya. Bila ditelusuri lebih jauh, ternyata di tahun 2009 subdimensi interelasi

justru merupakan salah satu subdimensi yang mendukung peningkatan skor dimensi struktur. Di tahun 2012 justru menurun drastis dari skor 2,50 kondisi *sehat*, menurun statusnya menjadi *cukup sehat* (skor 1,90).

Perolehan skor ini menunjukkan gambaran dinamika aktor-aktor dalam arena MS, karakteristik utama dari aktor-aktor tersebut dan relasi diantara mereka (kuantitas dan kualitas partisipasi para aktor MS dan perannya dalam mempengaruhi kebijakan). Analisis dan refleksi atas dimensi struktur dapat dijelaskan pada uraian berikut ini.

Partisipasi warga dalam hal menyumbang amal dan kerja sukarela menunjukkan kemandirian warga dalam memenuhi kepentingannya sendiri. Hasil penilaian IMS 2012 menunjukkan bahwa dari 16 kabupaten/kota, terdapat 11 kabupaten yang menunjukkan peningkatan level partisipasi warga (keluasan maupun kedalaman partisipasi). Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Buton, Takalar, Bima, Sumba Barat, Sumba Timur, Bantaeng, Baubau, Dompu, Muna, dan Kabupaten Gowa. Sedangkan 2 kabupaten, yakni Kabupaten Kupang dan Kabupaten Jeneponto, keduanya mengalami peningkatan pada subdimensi kedalaman partisipasi warga, namun mengalami penurunan pada subdimensi keluasan partisipasi. Sisanya, 3 kabupaten, yakni Kabupaten TTS, Lombok Tengah dan Kabupaten Buton Utara mengalami penurunan keluasan maupun kedalaman partisipasi.

Peningkatan skor subdimensi keluasan dan kedalaman partisipasi didukung oleh sejumlah perubahan penting baik dalam sumbangan amal, kerja sukarela, aksi-aksi kolektif dan lain sebagainya. Gambaran terkait partisipasi warga nampak dalam analisis indikator-indikator sebagai berikut, yakni:

- Menyumbang untuk amal di kalangan warga mengalami peningkatan. Ini terjadi hampir di semua daerah. Persentase warga yang menyumbang untuk amal secara rutin mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kesadaran warga untuk rela memberikan sumbangan spontanitas dalam bentuk dana maupun material lainnya untuk menunjang kegiatan amal atau kegiatan sosial tertentu, tradisi (seperti perkawinan, kematian dan sebagainya), bencana (kebakaran misalnya), dan lain-lain. Contoh menarik terjadi di Kupang dan Sumba Barat dikenal dengan tabungan persalinan (Tabulin), yaitu setiap warga memasukkan sumbangannya dalam kotak amal secara sukarela untuk biaya ibu melahirkan. Di Kupang, gerakan dana solidaritas untuk Tabulin sudah berjalan di 10 desa (dari 177 desa) dengan perolehan tabungan sebesar Rp. 14.600.000,- (*per Oktober 2012*). Tabulin ini sudah membantu biaya transportasi bagi ibu hamil, ibu melahirkan (9 orang) dan juga warga yang sakit berat ke rumah sakit (15 orang). Saat ini ada satu desa yaitu Desa Oesena tidak sulit lagi soal transportasi untuk ibu hamil karena sudah ada 5 unit kendaraan yang siap melayani 24 jam. dengan mengumpulkan sumbangan untuk berbagai keperluan warga yang sedang ditimpa kemalangan atau untuk berbagai hajatan warga (misalnya rumah terbakar, bencana alam, Khitanan, pernikahan, uparaca adat Kematian). Contohnya di Kabupaten Bima dikenal istilah: *mbolo weki*, *mbaju rasa*, *mbolo keluarga*, *tekarane'e*. *Mbolo weki* akan lebih baik jika digunakan untuk mengantisipasi potensi terjadinya konflik, daripada digunakan setelah konflik terjadi. Selain itu, *Mbolo weki* juga baik dimanfaatkan dalam mengatasi berbagai persoalan warga, seperti kekeringan, bencana alam dan lain-lain. Sumbangan-sumbangan spontan dikumpulkan dan diberikan kepada kerabat yang sedang kemalangan dan hajatan dan bagi para korban konflik sosial. Di Sumba Timur dan Sumba Barat dikenal istilah

sambung tangan. Sumbangan sukarela warga lainnya diarahkan untuk memperbaiki fasilitas umum seperti kantor desa, jalan desa, perintisan jalan tani, jembatan rumah ibadah saluran irigasi dan sebagainya. Di Gowa, warga desa dengan cara mengumpulkan sumbangan berhasil membangun kembali jembatan di Tetebaru, perintisan jalan tani di Desa Datara, perbaikan selokan di Desa Bonto Buddung, dan menghimpun dana sinoman di Desa Tokka.

Di Lombok Tengah tahun 2012 diselenggarakan Tabliq Akbar yang dihadiri KH Yusuf Mansyur, dalam waktu 30 menit telah sanggup terkumpul dana amal sebesar Rp. 130 juta. Dana ini setengahnya untuk pembangunan masjid dan setengahnya untuk kegiatan penguatan kapasitas pengurus Majelis. Begitu pula yang dilakukan Yayasan Keliling Muhammadiyah yang berdiri sejak tahun 2009, melakukan kegiatan amal seperti sunatan masal, santunan orang jompo dan santunan siswa miskin yang bersumber dari donatur dari luar daerah dan Pemda.

- Kerja sukarela masih cukup tinggi utamanya pada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Solidaritas untuk bekerja sukarela tumbuh dari kesadaran warga dalam memelihara nilai sosial budaya dan dalam kehidupan keagamaan dan masih melekat di tengah kehidupan warga telah berkembang baik di masyarakat sebagai suatu bentuk kearifan lokal nampak hampir di semua daerah. Di Gowa misalnya, kerja sukarela dapat ditunjukkan oleh Remaja Mesjid Nurul Jihad rutin melaksanakan kegiatan kerja bakti merintis jalan tani di setiap dusun yang ada di desa Datara. Kelompok remaja putus sekolah dan pengangguran Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe, rutin melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan fasilitas-fasilitas umum. HIPMA GOWA melakukan penanaman pohon di kec. Tompobulu. FOPMAGATRA melakukan pelatihan kelompok tani di Kecamatan Tompobulu tentang tatacara distribusi hasil pertanian. Forum Komunitas Sabo melakukan perbaikan saluran irigasi secara swadaya. Warga desa bersama-sama membersihkan kuburan di Pemakaman Islam Benteng Tinggia Malino setiap enam bulan. Dan secara umum warga desa membersihkan selokan dilaksanakan secara gotong royong
- Aksi kolektif juga meningkat. Di Gowa, Majelis Ta'lim dalam melakukan kegiatan-kegiatan diskusi atau pengajian dengan kekuatan finansial dari anggotanya. Kelompok ekonomi perempuan, dalam melakukan kegiatan rutinnnya dirangkaikan dengan kegiatan arisan, biaya konsumsi dari anggotanya. contohnya menulis surat komplain, menanggapi takshow pelayanan publik di radio, menandatangani piagam warga; melakukan demonstrasi, dan sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan bertumbuhkembangnya forum-forum warga yang meningkat dari segi jumlah OMS maupun kapasitas pengelola serta ragam bidang dan isu yang ditekuni. Ragam isu yang diperoleh dari hasil studi dokumen pengukuran IMS antara lain bidang pengawasan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik, Isu kemandirian desa/perencanaan dan penganggaran desa partisipatif, perancangan perda partisipatif, penguatan ekonomi kerakyatan dan isu keberlanjutan lingkungan.
- Kegiatan sosial kemasyarakatan meningkat dan penyelesaian konflik dapat diselesaikan dalam forum musyawarah warga. Partisipasi warga cukup tinggi dalam kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, karang taruna, Majelis Taklim, PKK dan Kelompok Tani. Di Jeneponto dilakukan *Jumat Bersih*, ronda kampung dan sebagainya. Dalam hal-

hal tertentu berkaitan dengan penyelesaian konflik sosial, warga juga berpartisipasi mendamaikan dengan cara mengumpulkan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa dalam musyawarah adat. Contohnya: Warga Desa Patani di Kabupaten Takalar bersama OMS melakukan swadaya pembangunan menara mesjid dengan nominal kurang lebih 200 juta dengan harus mengumpulkan dana tersebut dengan beberapa tahap.

- Kecenderungan warga terlibat menjadi anggota di beberapa organisasi masyarakat sipil meningkat. Di Lombok Tengah, fakta menyebutkan bahwa warga dapat terlibat lebih dari satu OMS. Misalnya seorang petani, dia menjadi anggota kelompok tani dan anggota organisasi keagamaan.⁶ Anggota Perempuan Usaha Kecil juga menjadi anggota pada OMS lainnya. Dengan bertumbuhnya berbagai OMS di level warga/komunitas, sekaligus menunjukkan bahwa warga semakin banyak terlibat dalam berbagai forum dan organisasi warga. Keterlibatan warga tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi warga. Adanya peningkatan partisipasi ini pada gilirannya berdampak pula pada meningkatnya kesejahteraan warga, sebagai akibat langsung adanya interaksi dinamis antara para aktor, OMS di level komunitas dan beberapa tujuannya mulai tercapai. Misalnya terkait anggaran dan akses berbagai bantuan yang dapat disalurkan kepada kelompok-kelompok yang sungguh membutuhkan (terpinggirkan).
- Pada situasi lain, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab menurunnya sumbangan sukarela di beberapa daerah. Faktor tersebut yaitu kondisi ekonomi warga yang sulit, minimnya respon pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga dan penyaluran sumbangan yang salah sasaran dan disalahgunakan. Kemudian warga memilih untuk bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri dibanding mengeluarkan sejumlah uang untuk kepentingan banyak orang. Sumbangan warga untuk kegiatan HUT Kemerdekaan sekalipun hanya bernilai seribu rupiah, tidak diindahkan oleh warga di desa-desa.
- Hasil refleksi menunjukkan bahwa ada tantangan yang melemahkan kerja-kerja sukarela dalam masyarakat. Masuknya berbagai pendekatan yang memanjakan dan seakan membangkitkan semangat kerja gotong royong tetapi digerakkan dengan uang. Seperti pendekatan PNPM dan lembaga lain yang cenderung menurunkan tradisi tersebut.

Keragaman OMS meningkat secara kuantitas dan posisi OMS dalam mempengaruhi kebijakan publik. Hasil Pemetaan OMS⁷ di 16 Kabupaten menunjukkan jumlah OMS dan spektrumnya rata-rata mengalami peningkatan kuantitas. Contohnya Kabupaten Kupang tahun 2009 teridentifikasi 30 OMS, tahun 2012 menjadi 60 OMS; Di Sumba Timur pada tahun 2007 teridentifikasi 27 OMS, tahun 2012 menjadi 82 OMS; Di Sumba Barat, pada tahun 2007 teridentifikasi 54 OMS, tahun 2012 menjadi 80 OMS. Di Muna, semakin banyak OMS yang bekerja pada ranah advokasi kebijakan. Pada tahun 2004 yang baru muncul adalah Swami, Lambu Ina, Polesterang, Lepmasal, YPWPM, Lepasama. Tahun 2007 mulai bermunculan yaitu Lambu Ina, Kritik, dan di tahun 2012 bertambah dengan Lira, Aliansi Kader, Paper Green, dan Aliansi orang Tua Murid. Di Buton Utara, Pada 2007, belum ada

⁶ Lihat Progress Partner Review ACCESS Tahap II pada organisasi AMB, Berugak Desa, Asppuk dan Somasi Tahun 2012.

⁷ Setiap daerah dilakukan pemetaan OMS. Metode pemetaan menggunakan FGD selama 1 hari, diikuti oleh lebih kurang 15 orang. Pemetaan ini mengidentifikasi tiga karakter kerja OMS: (1) OMS yang bekerja pada ranah advokasi kebijakan, (2) OMS yang bekerja pada pengentasan kemiskinan (tanpa mengurus perubahan kebijakan), dan (3) OMS yang berada di luar karakter 1 dan 2.

OMS yang berada pada lingkaran kecil (bekerja pada advokasi). Saat ini Kab. Butur telah memiliki 9 OMS yang memiliki kemampuan mempengaruhi kebijakan. Di Baubau, jika dibandingkan dengan hasil pemetaan kekuatan OMS yang dilakukan pada 2009, hasil pada 2012 ini memperlihatkan bahwa PRIMA yang dulunya berada di lingkaran pusat, saat ini tergeser karena lembaga ini mengalami perubahan wilayah kerja. JPKP tergeser karena mengalami penurunan jumlah wilayah dampingan dan pelaksanaannya, program kerja juga lebih kecil. Sementara Pelangi yang baru terbentuk pada 2009, sebelumnya merupakan bagian dari Yayasan Piara (Peduli Anak Nusantara) melakukan pendampingan kepada anak korban pertikaian horizontal pada 1999 dan program pencegahan HIV Aids pada 2000-2002.

Di Gowa, dibandingkan dengan peta pengaruh OMS pada tahun 2009, OMS di tahun 2012 semakin banyak menghasilkan kebijakan. Serta semakin beragam OMS yang berhasil mendorong lahirnya kebijakan publik melalui kerja-kerja advokasi yang dilakukan. Potensi OMS yang akan mendorong kebijakan publik semakin tinggi, misalnya TGC, LBI, KNPI, YKM, YBC, YPL dan KPL Karaengpuang. Di Lombok Barat, pada tahun 2009 ada 58 OMS, dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 96 OMS. Penambahan ini cukup besar, bahkan jumlah itu baru perkiraan saja dari narasumber pemetaan.

Interelasi antar OMS direkatkan oleh isu yang diusung MS dan berada pada semua level baik desa, kecamatan maupun kabupaten. Hal ini ditandai oleh adanya keaktifan MS untuk melakukan komunikasi, saling berbagi informasi dan giat melakukan kerja sama antara aktor-aktor MS. Berbagai isu-isu umum yang menjadi prioritas MS dapat diperjuangkan dalam arena yang didukung oleh adanya interaksi dinamis (*civic engagement*) dengan para pihak di level desa hingga level kabupaten. Perkembangan lainnya yang nampak adalah menguatnya relasi antar OMS dan semakin diperluas pada relasi interpersonal dengan aktor lain di luar MS. Subdimensi interelasi merupakan salah satu kekuatan/aset penting yang menopang dimensi struktur di enam belas daerah. Dikatakan demikian karena ditemukan sebelas daerah yang mengalami peningkatan skor dalam subdimensi ini, yakni Kabupaten TTS, Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat, Bima, Dompu, Lombok Barat, Buton Utara, Buton, Bantaeng, Takalar dan Kota Baubau. Lima daerah meningkat signifikan, yakni kabupaten Kupang, Sumba Timur, Bima, Buton dan Takalar. Sedangkan enam daerah lainnya mengalami sedikit peningkatan, yakni Kabupaten TTS, Sumba Barat, Dompu, Buton Utara, Bantaeng, dan Kota Baubau. Khusus Buton dan Takalar, mengalami peningkatan signifikan sekaligus berhasil meningkatkan status kesehatan MS hingga berada pada kondisi *sehat*, sedangkan Kabupaten Sumba Barat mengalami peningkatan pada status *sehat*.

Dinamika yang berkembang di sejumlah kabupaten menunjukkan perkembangan tingkat komunikasi dan saling berbagi informasi antara aktor-aktor MS yang semakin membaik. Komunikasi dan saling berbagi informasi umumnya dipantik oleh adanya isu atau tema yang ingin didorong bersama, misalnya OMS HIPERMATA di Kabupaten Takalar, gencar melakukan kampanye *Go Green* (gerakan warga untuk keberlanjutan lingkungan dengan menanam sejuta pohon), P4 (Pendidikan Politik Pemilih Pemula) bekerja sama dengan KPUD, serta dialog dengan KNPI dan ANSHOR membahas tema kepemudaan. Hal ini terjadi karena didukung oleh adanya berbagai media komunikasi antar MS semakin berkembang, mulai dari pertemuan tatap muka (diskusi) intensif, email, dan virtual. Selain itu Kerja sama antar MS semakin sudah dilakukan secara meluas dan melibatkan banyak pihak mulai dari OMS di tingkat basis hingga OMS lintas wilayah. Contoh Keberhasilan

yang menonjol dari menguatnya relasi antar aktor MS adalah disahkannya sejumlah peraturan daerah, misalnya Perda dan atau Perbup. Misalnya yang terjadi di Buton Utara, pembuatan Perda Perencanaan Partisipatif dan Perda ADPD (alokasi Dana Perimbangan desa) didorong oleh sejumlah OMS, yakni YAKIIN, LEPMI, APDESI dan aktor-aktor MS yang tergabung dalam FLA. Berbagai organisasi yang menjadi partisipan FLA ini aktif membangun komunikasi di antara mereka dan dengan pemerintah kabupaten.

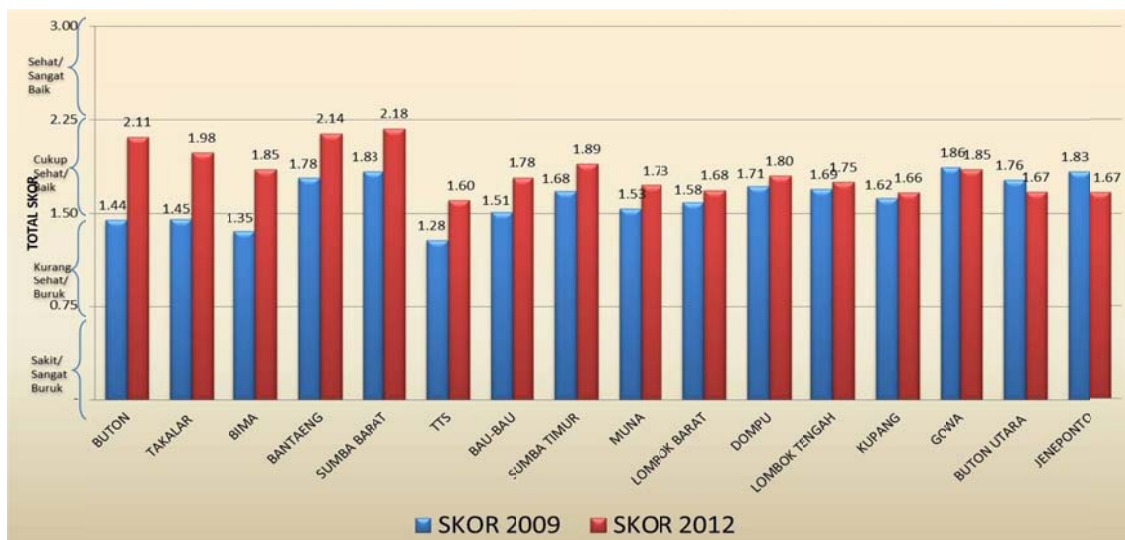
Pada subdimensi interelasi lima daerah mengalami penurunan skor yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Lombok barat, Muna, Jeneponto dan Gowa. Dengan catatan lima daerah, meskipun skor turun, namun tetap berada pada status yang sama yakni *cukup sehat*. Catatan khusus untuk Kabupaten Lombok Barat, tahun 2009 merupakan satu-satunya dari 16 kabupaten yang berhasil meraih skor tertinggi 2,50 dan menyandang status sebagai kabupaten yang *sehat*. Namun di tahun 2012 justru menurun dan hanya memperoleh skor 1,90 atau turun 0,60 poin, dan statusnya juga turun menjadi *cukup sehat*. Hal ini disebabkan oleh program-program dengan aturan yang berbeda yang membuat OMS-OMS tersekat-sekat serta persoalan eksistensi (ego) masing-masing organisasi/program membuat komunikasi antar organisasi masyarakat sipil kurang berjalan lancar.

Di Kabupaten Muna, Subdimensi interelasi mengalami penurunan. Penurunan skor tampaknya dikontibusi oleh kurangnya ruang dialog dan diskusi untuk berbagi informasi antar OMS. Aktor-aktor MS lebih sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Namun demikian sejumlah inisiatif untuk tetap menjaga relasi baik antar aktor MS tetap dijalankan.

Sumber daya OMS cenderung meningkat dibanding situasi IMS pada tahun 2009. Kondisi yang mempengaruhi MS di 16 kabupaten yakni kecukupan sumber daya OMS untuk mencapai visi, misi dan tujuan-tujuannya. Dari data hasil penilaian ditemukan tiga belas kabupaten mengalami peningkatan, sedangkan tiga kabupaten lainnya, yakni Muna, Buton Utara dan Jeneponto mengalami penurunan. Dalam tiga tahun terakhir ini terdapat fakta bahwa upaya-upaya MS untuk menggali sumber daya semakin meningkat, misalnya tumbuhnya lembaga ekonomi perempuan, arisan jamban sehat, dan iuran anggota arisan yang diprakarsai oleh OMS dan para aktor MS misalnya fasilitator desa. Meskipun demikian di tiga daerah yang mengalami penurunan tersebut fakta bahwa sumber daya finansial organisasi dan kemampuan menggali sumber daya masih tergolong sangat lemah. Program pemberdayaan warga yang *disupport* pemerintah, donor internasional ataupun program kerja sama pemerintah dengan swasta belum menunjukkan hasil dalam hal keberlanjutan kerja-kerja OMS di masa mendatang.

II. Dimensi Lingkungan

Bagian ini menggambarkan faktor-faktor eksternal yang berkontribusi terhadap kekuatan dan kelemahan masyarakat sipil. Dalam bagian ini dapat dilihat apakah lingkungan menjadi faktor pendukung atau malah penghambat perkembangan masyarakat sipil sebagai arena di mana nilai-nilai kemasyarakatan dan berbagai kepentingan berinteraksi. Dimensi ini mencakup tujuh subdimensi yakni: konteks politik, kebebasan dan hak-hak dasar, sosio-ekonomi, sosial budaya, hukum dan kebijakan, relasi negara-MS dan relasi pasar-MS. Hasil Pengukuran IMS 16 Kabupaten pada dimensi lingkungan, tersaji pada diagram 4 berikut ini:



Grafik batang di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan cukup signifikan pada dimensi lingkungan di enam daerah, yakni: Buton, Takalar, Bima, Bantaeng, Sumba Barat dan TTS. Terdapat empat kabupaten yaitu Kabupaten Buton, Takalar, Bima dan TTS yang telah berhasil meningkatkan perolehan skor secara signifikan dan sekaligus memperbaiki atau mendongkrak status kesehatan MS dari kondisi *kurang sehat* menjadi *cukup sehat*. Jika dicermati lebih jauh, terdapat dua kabupaten yakni Bantaeng dan Sumba Barat yang mengalami peningkatan signifikan, namun posisi di tahun 2012 masih relatif sama dengan posisi 2009 karena berada pada selang yang sama, yakni berada pada kondisi *cukup sehat*.

Hasil penilaian IMS 2012 seperti tersaji pada diagram batang di atas juga menunjukkan bahwa terdapat 13 kabupaten yang mengalami peningkatan perolehan skor dan 3 kabupaten sisanya mengalami penurunan skor (yaitu Kabupaten Jeneponto, Buton Utara dan Gowa). Meskipun demikian nampak bahwa secara umum kondisi MS di 16 kabupaten rata-rata berada pada kondisi *cukup sehat*. Hal ini berarti faktor-faktor lingkungan eksternal telah turut berkontribusi menguatkan MS. Lingkungan cukup mendukung perkembangan MS sebagai arena dimana nilai-nilai kemasyarakatan dan kepentingan berinteraksi.

Situasi politik di Indonesia mendukung keberadaan masyarakat sipil, utamanya pada daerah yang mengalami peningkatan skor. Situasi ini dapat dilihat pada upaya penegakan hukum, hak-hak politik, efektivitas negara, korupsi, kompetisi politik dan desentralisasi.

Penegakan hukum mulai berjalan ditandai dengan perubahan kebijakan dan perlindungan atas adat. Berbagai aksi dan gerakan yang bernuansa ‘tekanan politik’ yang dilakukan oleh OMS direspon pemerintah dengan berbagai perbaikan kebijakan. Penerapan hukum adat juga dirasakan menguat dengan adanya aksi warga untuk menggagalkan pemekaran Desa Lapandewa di Kabupaten Buton. Keberhasilan menggagalkan pemekaran ini karena praktik sistem adat masih kental di desa tersebut, yang menjadi pemersatu warga yang berasal dari satu rumpun. Penerapan hukum adat juga menjadi perekat dalam pengelolaan SDA. Contoh lainnya adalah praktik ‘sasi’, yaitu pembatasan areal di laut yang tidak boleh diolah pada waktu tertentu dan ‘kaombo’, yaitu pembatasan areal di laut atau darat yang tidak boleh

diolah pada waktu tertentu. Sistem adat ini dianggap berhasil menjaga habitat ikan dan sumber daya hutan.

Hak-hak politik menguat dan dimanfaatkan oleh aktor OMS sebagai strategi mendorong perubahan. Tantangan yang masih dijumpai adalah banyaknya aktor yang terlibat dalam Pemilukada yang sarat kepentingan dan intervensi mempengaruhi kebebasan pilihan politik warga. Hal tersebut jelas bertolak belakang dengan prinsip aksi-aksi non partisan OMS. Namun, di beberapa kabupaten hal ini dianggap sah-sah saja dan cenderung dipahami sebagai pilihan alternatif yang membuka ruang bagi berapa OMS untuk memudahkan advokasi produk kebijakan dan memeperlancar lobi-lobi untuk mempengaruhi kebijakan publik. Keterlibatan dalam politik praksis ini dianggap justeru menguatkan gerakan MS memperbesar kekuatan menggerakkan dan mendorong pemerintah agar mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Warga diberikan hak-hak politik yang cukup substansial dan juga kesempatan yang cukup berarti untuk partisipasi politik, meskipun ada beberapa hambatan kecil untuk mendapat kebebasan penuh dalam berpartisipasi di proses-proses politik. Perkembangan tersebut direfleksikan bahwa masyarakat diberi ruang yang luas untuk berekspresi dan beraktualisasi diri dan menentukan hak pilih. Masyarakat sipil sudah bebas mengeluarkan pendapat.

Pendelegasian kewenangan pemerintah dari kabupaten ke desa (desentralisasi) sudah mulai nampak. Hal ini ditandai oleh banyak pengeluaran/belanja pemerintah kabupaten yang didelegasikan kepada pemerintah desa. Beberapa kewenangan pemerintah kabupaten telah didelegasikan kepada pemerintah desa, misalnya membuat Perdes, APBDes, melakukan proses pemilihan aparat desa, mengelola potensi sumber daya desa, dan trantibmas. Kabupaten Buton telah melaksanakan kewenangan tersebut. Program yang masuk ke desa telah mengacu pada RPJM Desa dikukuhkan dengan Perda No 4 tahun 2008 tentang Peraturan Desa. Selain itu, banyak pemerintah desa di Kabupaten Buton yang sudah menginisiasi dan mengusulkan perdes.

Terungkapnya kasus korupsi cukup marak terjadi di daerah. Kasus korupsi ini melibatkan pejabat pemerintah kabupaten dan banyak kasus sudah masuk ke proses hukum. Beberapa pejabat tersebut adalah mantan Pjs. Bupati, mantan Kadis Pertanian, dan Kadis Perhubungan. (contoh kasus Buton Utara). Begitu pula seperti yang terjadi di Kabupaten Jeneponto. Tingkat korupsi pada sektor negara dianggap sangat buruk. Mencuatnya sejumlah kasus korupsi dan status *disclaimer* pada hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemkab Jeneponto, membuat skor indikator ini sangat rendah. Tantangan yang muncul pada pengungkapan kasus korupsi ini ada beberapa hal. Pertama, informasi tentang korupsi sangat terbatas. Walaupun ada indikasi praktik korupsi namun masih takut dibicarakan apalagi dilaporkan karena ketiadaan bukti- bukti dan tidak paham mekanisme pengaduannya. Kedua masih banyak anggapan bahwa yang dikatakan korupsi itu jika kasus sudah dilaporkan dan diproses di lembaga peradilan, jika baru 'indikasi' itu sudah hal biasa. Misalnya *mark up* harga di instansi pemerintah saat pengadaan ATK atau penandatanganan kuitansi kosong untuk biaya makan minum, dan lain-lain.

Negara dirasakan belum efektif melayani warga. Negara belum sepenuhnya dapat memenuhi fungsi-fungsi yang telah ditetapkan, misalnya fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembuatan kebijakan/regulasi. Aparat pemerintah telah berfungsi tetapi dirasa jauh dari kompeten dan tidak responsif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang

ditetapkan. Kebijakan pemerintah tampaknya lebih menguntungkan kelompok tertentu seperti 'tim sukses'⁸ sehingga proyek yang seharusnya untuk masyarakat dan posisi strategis lebih banyak diperoleh orang-orang yang dekat lingkaran kekuasaan. Di sisi lain, seringkali inisiatif masyarakat untuk pembangunan di desa tidak direspon pemerintah melalui SKPD-nya yg ditandai dengan ketidakhadiran mereka pada kegiatan-kegiatan warga. Jadi pelaksanaan program pemerintah nampaknya belum 'melayani'. Terkait dengan ADD, petunjuk teknis ADD disamaratakan di seluruh desa sehingga menyulitkan.

Jaminan kebebasan dan hak-hak dasar bagi warga tidak dipraktikkan secara konsisten. Dalam hal kebebasan sipil misalnya kebebasan berekspresi, berkumpul, telah dijamin oleh hukum namun belum sepenuhnya terlaksana dalam prakteknya. Atau dengan kata lain, jaminan hukum atas kebebasan sipil masih belum dijalankan secara konsisten dan dalam praktik masih terdapat pembatasan bahkan pelarangan. Dalam hal hak-hak atas informasi, akses publik terhadap informasi telah dijamin oleh hukum. Ada aturan yang menjamin akses publik terhadap informasi tetapi dalam prakteknya, publik masih sulit mengakses sejumlah dokumen pemerintah. Misalnya: informasi mengenai Perda/APBD, informasi mendapatkan pelayanan publik dan informasi mendapatkan pemberdayaan, dan sebagainya. Sementara praktik baik justru terjadi di tingkat desa, misalnya praktik yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Bantaeng. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa disampaikan di hadapan forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diumumkan dan dipasang di Masjid serta Papan Informasi di desa. Warga dapat langsung mengklarifikasi LKPJ tersebut lewat BPD di daerah di mana mereka tinggal.

Situasi sosial ekonomi masih menjadi penghambat efektivitas masyarakat sipil. Kemiskinan yang meluas (> 40% masyarakat berpendapatan kurang dari Rp 15.000 per hari); Krisis ekonomi parah; kesenjangan sosial-ekonomi yang tinggi, tingkat Buta huruf tinggi dan minimnya infrastruktur teknologi informasi.

Situasi sosial budaya perlahan-lahan kurang mendukung efektivitas masyarakat sipil. Tingkat kepercayaan antar warga dinilai menurun karena kurangnya rasa aman⁹. Kesadaran untuk mendahulukan kepentingan umum cenderung menurun, dominan terjadi pada masyarakat yang tinggal pada wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh tiap individu sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Contohnya tidak aktif dalam memelopori aksi-aksi lingkungan (Jumat bersih, gotong royong, dan lain-lain).

Semangat warga masyarakat dalam memerangi budaya patriarki cukup tinggi. Budaya patriarki yang dimaksud adalah penomorduaan perempuan dalam hal akses, kontrol dan manfaat pembangunan, hak waris terhadap perempuan, kawin paksa terhadap perempuan. Budaya patriarki ini sedikit demi sedikit mulai terkikis dalam masyarakat. Hal ini diantaranya disebabkan oleh semakin banyaknya perempuan yang aktif mengikuti berbagai kegiatan di luar rumah, seperti mengikuti pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh OMS dengan berbagai programnya. Kemudian perempuan mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok usaha kecil, perempuan dilibatkan dalam proses musrenbang, perempuan mulai menduduki beberapa posisi strategis di organisasi yang diikutinya serta ada beberapa contoh dimana perempuan menjadi pemimpin di tingkat RT, desa sampai BPD. Indikator budaya patriarki mengalami peningkatan. Berkurangnya budaya patriarki

⁸ Tim sukses dikonotasikan sebagai orang atau kumpulan orang yang membantu pemenangan kepala daerah.

⁹ Lihat lampiran interpretasi Kabupaten Bantaeng.

salah satunya dipengaruhi oleh program-program pemberdayaan yang melibatkan lebih banyak perempuan (PNPM, ACCESS , BASIC dan program lainnya). Dalam tiga tahun terakhir ini semakin banyak perempuan menduduki peran-peran strategis seperti Lurah, kepala sekolah, Kasi dan Kabag di pemkot, serta DPRD.

Aktivitas advokasi yang dilakukan kelompok warga tidak mengalami hambatan. MS bebas untuk melakukan kritik pemerintah secara langsung baik secara tertulis maupun aksi-aksi demonstrasi. Begitu pula dalam hal mengikuti kampanye politik dari parpol tertentu atau dari kandidat tertentu.

Relasi negara dan masyarakat sipil masih berada pada aspek formal. Pada ruang-ruang formal relasi ini sangat baik terlihat, misalnya pada dialog dan kerja sama. Dialog cukup aktif dilakukan dengan mengisi mekanisme-mekanisme yang disediakan pemerintah, DPRD dan lembaga penyedia layanan publik. Di Sumba Barat, kesediaan negara untuk berdialog dengan aktor-aktor MS terlihat pada setiap tahapan Perdes tentang Persyaratan Peminjaman Keuangan Desa di desa Hupumada Kecamatan Wanokaka. Cerita lain juga terjadi di desa Kodaka, dimana pemerintah desa terlibat sampai tahap akhir perumusan Perdes Transparansi Keuangan Desa. Dialog MS dengan pemerintah nampak pula oleh adanya inisiatif BPMD Sumba Barat berdialog dengan MS menggalang masukan untuk mengkaji indikator kemiskinan lokal. Praktik baik juga datang dari DPRD Sumba Barat yang berinisiatif melakukan dialog dengan perwakilan MS untuk menggalang masukan dalam proses perumusan Perda Pelayanan Publik (walaupun pelibatangannya belum luas). DPRD juga melakukan konsultasi publik kepada beberapa kelompok masyarakat untuk mengkomunikasikan dan memperoleh masukan terhadap perumusan Perda KIBA (Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak). Dialog juga terjadi dalam hal pengelolaan ADD. Praktik kerja sama juga dilakukan melalui pendistribusian bantuan yang diberikan pemerintah meskipun hanya pada kelompok atau organisasi masyarakat sipil ‘tertentu’. Relasi formal yang terjadi tersebut ternyata tidak disambut dengan tindak lanjut yang konkret sehingga ini menyebabkan kekecewaan warga kepada pemerintah.

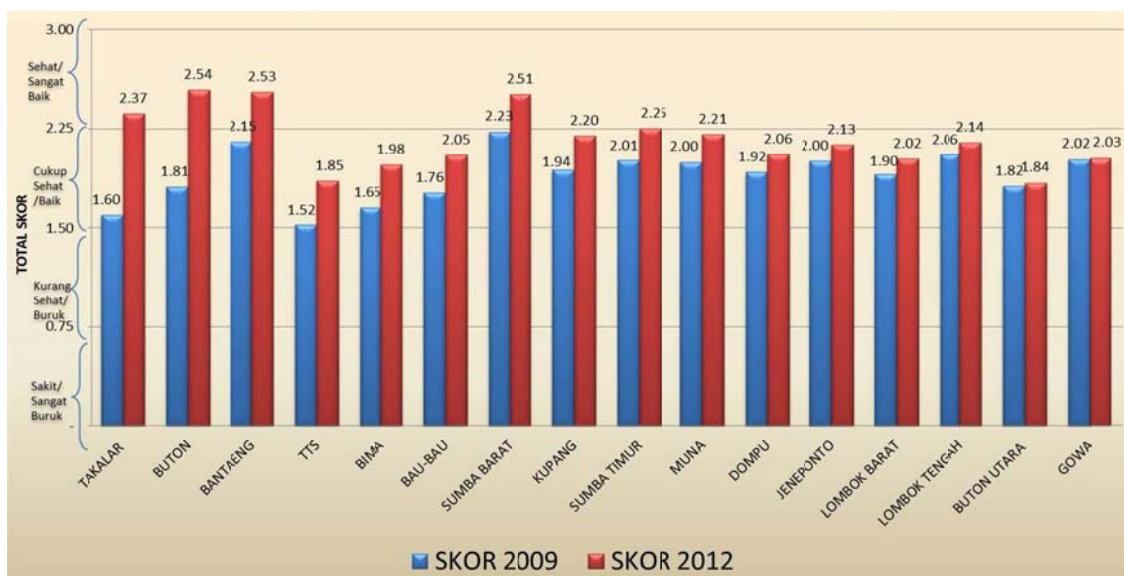
Dalam hal otonomi, MS cukup eksis dan berfungsi terhadap negara secara independen. OMS bebas beroperasi tanpa campur tangan pemerintah. Adanya kontrol pemerintah tidak didesain dan dibatasi secara wajar untuk melindungi kepentingan publik yang sah. Negara menerima independensi MS, namun operasi OMS kadangkala masih diintervensi oleh pemerintah.

Sektor pasar dan masyarakat sipil belum berelasi dengan baik. Dalam kasus-kasus tertentu misalnya kasus tambang sikap pasar cenderung bermusuhan, seperti terjadi di Kupang, TTS, Sumba Timur dan Barat. Begitu pula dengan Tanggung jawab sosial perusahaan. Gagasan-gagasan dan aksi-aksi tanggung jawab sosial perusahaan belum terbangun dengan baik. Segala bentuk tanggung jawab sosial perusahaan umumnya masih bersifat karitatif belaka, belum mengarah kepada pemberdayaan. Kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*). Keragaman Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang menerima dukungan dari sektor swasta menunjukkan fakta bahwa amat terbatas jenis OMS yang menerima dana dari sektor swasta. Di Lombok Barat dan Lombok Tengah, ada investasi yg masuk dan perkembangan pengusaha lokal membaik, namun hubungan hubungan dinamis OMS dan perusahaan belum berkembang baik. Kerja sama masih sangat jarang terjadi. Hal ini terjadi karena OMS belum berinisiatif melibatkan pasar dalam kegiatan OMS, di lain sisi

sikap Pasar menilai OMS belum memberi manfaat yang menguntungkan jika kerja sama dilakukan dengan OMS. Pasar cenderung acuh tak acuh terhadap OMS, *social cost* masih dibebankan pada warga. Di Sumba Timur proyek pembangunan jembatan dikerjakan tanpa menyiapkan jalur alternatif yang memadai, PLTD milik PLN di Km 8 Kelurahan Kambajawa yang menyebabkan terjadinya polusi suara dan udara (banyak anak terkena ISPA), penggilingan batu di Km 7 menyebabkan debu. Banyak dampak- dampak yang ditimbulkan namun tidak ada satu pun pihak yang menanggapi keluhan warga yang disampaikan pada mereka.

III. Dimensi Nilai

Analisis dalam dimensi nilai akan meninjau prinsip, nilai-nilai yang diyakini, dipraktikkan dan dipromosikan di dalam arena masyarakat sipil. Ada tujuh subdimensi yang tercakup didalamnya yaitu demokrasi, transparansi, toleransi, anti kekerasan, kesetaraan gender, penanggulangan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan. Hasil Pengukuran IMS 16 Kabupaten pada Dimensi Nilai, tersaji pada diagram 5 berikut ini:



Grafik di atas menunjukkan bahwa peningkatan nilai terjadi pada seluruh daerah. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang diyakini, semakin banyak dipraktikkan dan dipromosikan di dalam arena masyarakat sipil.

Nilai-nilai kesetaraan gender telah dipraktikkan dan dipromosikan oleh masyarakat sipil. Subdimensi kesetaraan gender merupakan subdimensi yang memberikan sumbangan terbesar bagi peningkatan skor dimensi nilai. Hal ini ditandai dengan meluasnya praktik-praktik kesetaraan gender di OMS seperti di lembaga-lembaga gereja, LSM (Yayasan Wali Ati(Sumba Barat), Yayasan Wanlip (Sumba Timur), Stimulant Institute (Sumba Timur). Program pemerintah seperti PNPM juga memberi ruang yang cukup besar bagi keterlibatan perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan posisi tawar perempuan. Kepengurusan PIPM banyak diisi oleh perempuan, contoh di Kelurahan Kaisabu dan Kelurahan Kantalai (Kota Baubau). Anggota PIPM sebagian besar perempuan dari 5 sampai 7 orang. Di Kelurahan Karya Baru (Kota Baubau), GAPOKTAN SIGIMANURU memiliki pengurusnya 7 orang 4

orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Pengurus yang terdiri dari Bendahara, Manajer, Sekretaris, Administrator, Pembukuan dan Kasir dipilih secara partisipatif oleh masyarakat. Sementara dalam peningkatan kapasitas di LSM, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama sebagaimana dilakukan oleh APPAK, YASINTA, PRIMA dan PELANGI (Kota Baubau) serta LSM lainnya di 16 wilayah.

Peningkatan kapasitas perempuan menunjukkan dampak semakin banyak perempuan yang berperan dalam ruang publik baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Perempuan juga telah menduduki posisi strategis sebagai pemimpin di desa, ketua Rukun Tetangga (RT), LPM, dan BPD. Keterlibatan perempuan saat ini sangat diperhitungkan. Sudah banyak perempuan dapat berbicara dan didengarkan dalam forum rapat di desa bahkan suara perempuan mampu mempengaruhi keputusan dalam berbagai forum, misalnya dalam forum musrenbang dan pengusulan RPJMDes. Perempuan juga telah terlibat aktif dalam mendorong perbaikan pelayanan publik.

Nilai-nilai demokrasi dipraktikkan dalam internal organisasi dan ranah advokasi kebijakan. Secara umum, terjadi peningkatan skor pada subdimensi ini. Dalam lingkup LSM (Yayasan, Perkumpulan dan lain sebagainya) terlihat semakin baiknya praktik demokrasi dalam internal kelembagaan seperti terlihat dalam penyusunan Renstra yang partisipatif dan SOP Lembaga. OMS juga semakin aktif mempromosikan demokratisasi baik pada level negara/kepemerintahan maupun pada level masyarakat. Upaya pada level negara terutama dilakukan dalam bentuk advokasi dan dialog untuk mempengaruhi agar proses dan substansi setiap kebijakan pemerintah selalu didasarkan atas dua prinsip demokrasi (partisipasi dan akuntabilitas). Kalangan OMS menuntut agar dalam setiap proses pembuatan undang-undang melibatkan partisipasi kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selain itu OMS aktif mempromosikan *democratic local governance* (tata pemerintahan lokal demokratis) dengan berbagai kegiatan untuk mempengaruhi proses dan substansi peraturan daerah/desa agar lebih partisipatif dan berorientasi kepada kepentingan rakyat, melakukan kontrol terhadap pemerintah, daerah dan sebagainya.

Pada tingkat masyarakat kalangan OMS memperjuangkan hak rakyat memperoleh informasi, terciptanya pengadilan yang bersih dan tidak memihak. Kalangan OMS juga aktif memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Berbagai jenis pendidikan diberikan seperti dalam bidang *civic education* (pendidikan kewarganegaraan), pendidikan hak-hak politik rakyat dalam pemilu berbentuk *voter education* (pendidikan tentang pemilihan suara), pendidikan HAM, pendidikan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, mempromosikan toleransi dan pluralisme, resolusi konflik, dan sebagainya.

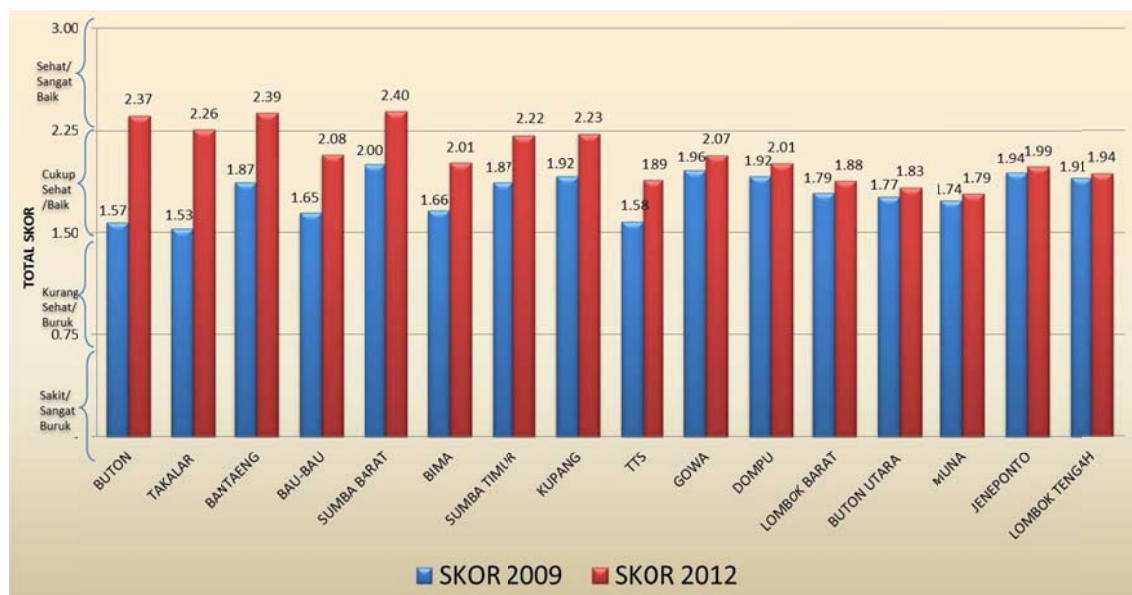
Praktik-praktik transparansi semakin meningkat di kalangan OMS. Hal ini merefleksikan bahwa OMS sudah mulai mempraktikkan nilai transparansi dalam hal pengelolaan keuangan secara internal dan eksternal. Salah satu contoh dalam program ACCESS Tahap II, nilai transparansi para mitranya dikembangkan melalui audit keuangan yang difasilitasi oleh tim program ACCESS. Tim ini melakukan audit pada mitra-mitra ACCESS. Selain itu mitra mitra menyiapkan *print out* pengelolaan bulanan lalu ditempelkan pada dinding ruangan serta dibagikan kepada setiap staff untuk dipelajari. Namun, di Kabupaten Muna, nilai ini belum dipraktikkan secara optimal, di mana OMS belum membuat pertanggungjawaban keuangan kepada seluruh anggota dan manajemen keuangan belum dikelola dengan baik.

Aksi-aksi penanggulangan Kemiskinan juga dipraktikkan dalam kalangan OMS. OMS aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan berbagai aktifitas yang mencakup program-program penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin lainnya. Pada tingkat advokasi terdapat sejumlah OMS yang menaruh kepedulian terhadap masalah-masalah kemiskinan. OMS cukup aktif mendesak pemerintah untuk menerapkan strategi pembangunan untuk mengatasi kemiskinan dan pemiskinan struktural yang dihadapi rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini ekonomi kerakyatan telah mengalami perkembangan baik. Skema pemberdayaan ekonomi cukup menguat dan nampak hampir di semua daerah. Dinamika OMS yang ditandai oleh semakin bertambahnya OMS baru dan semakin aktifnya OMS lama di seluruh kabupaten. OMS yang bergerak di bidang pemberdayaan juga tumbuh dan berkembang baik.

IV. Dimensi Dampak

Dimensi dampak merupakan tinjauan atas dampak yang ditimbulkan oleh MS dan kegiatan OMS terhadap kehidupan orang-perorang dan terhadap masyarakat luas. Terdapat 5 subdimensi yang dianalisis, yaitu mempengaruhi kebijakan publik, mendesakkan terwujudnya tanggungjawab negara dan perusahaan swasta, respon terhadap kepentingan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hasil Pengukuran IMS 16 Kabupaten pada Dimensi Dampak, tersaji pada diagram 6 berikut ini:



Grafik di atas menunjukkan bahwa seluruh wilayah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya dampak yang ditimbulkan MS dan kegiatan OMS terhadap kehidupan seseorang dan terhadap masyarakat luas (dalam bentuk mempengaruhi kebijakan publik, mendesakkan terwujudnya tanggungjawab negara dan perusahaan swasta, respon terhadap kepentingan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat). Dari 16 wilayah, 5 wilayah yang mengalami peningkatan cukup besar adalah

Buton, Takalar, Bantaeng, Kota Bau-Bau dan Sumba Barat. Adapun penjelasan mengenai peningkatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keaktifan MS dalam mempengaruhi kebijakan publik umumnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa MS telah memainkan peran cukup signifikan dalam area perubahan kebijakan. Tujuan-tujuan perubahan kebijakan terkait beberapa isu prioritas (seperti pelayanan publik, partisipasi, penegakan hukum, lingkungan hidup) mulai dapat dicapai. Beberapa praktik baik yang mendorong tercapainya tujuan-tujuan perubahan yaitu: (1) MS mendorong lahirnya sejumlah kebijakan di tingkat kabupaten hingga desa. Misal Perda KIBA (Kesehatan, Ibu, Bayi, dan Anak) dan Ranperda Perencanaan Pembangunan Partisipatif. (2) Para Kader, salah satunya KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) & beberapa tokoh masyarakat, mempengaruhi pemerintah desa untuk mendorong pelestarian hutan & memperjuangkan adanya kesepakatan bersama tentang PSDA yang dituangkan dalam butir-butir Kesepakatan Pelestarian Alam Desa. Saat Musrenbangdes semakin nampak bahwa publik terlibat, mendapat ruang untuk mempengaruhi kebijakan perencanaan pembangunan desa, ada kesempatan warga berbicara langsung dengan sejumlah SKPD terkait (seperti BPMD, Sosial, Kehutanan, Perindustrian) dan Pihak ke-tiga seperti LSM, PNPM. Hampir semua desa telah memiliki perdes. Sejumlah Perdes partisipatif ini didorong oleh sejumlah OMS di Sumba Barat.

Gerakan warga mendesak terwujudnya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan swasta semakin massif. Hal ini terlihat pada keaktifan MS di Desa Hupumada di Kabupaten Sumba Barat, sebagai contoh kasus PLTA di Lapopu. PLTA itu kini masih berada pada tahap pengerjaan (sejak tahun 2011 sampai sekarang).Awalnya mereka membuka jalan baru di hutan. Agar tetap memperhatikan lingkungan, OMS di desa seperti KMPH (kelompok masyarakat pelestari hutan) bertemu dengan pihak PLN (PLTA) dan meminta saat membuka jalan baru di hutan dan membangun tidak merusak hutan, dan menjaga agar tidak menebang pohon sembarangan. Selanjutnya adanya desakan warga ke PLN/PLTA untuk melayani listrik untuk Desa Rewarara di Kecamatan Rewarara. Selain itu para kader (KMPH) mendesak perusahaan untuk mempekerjakan masyarakat setempat sesuai keahlian seperti “tukang pekerja, satpam, atau mandor “.Sekitar 30-an lebih orang diterima bekerja dalam proyek PLTA Lapopu. Kemudian KMPH juga mendesak CV Lestari dari Waikabubak agar jangan menebang pohon sembarangan saat pelebaran jalan yang masuk hingga ke hutan, aksi yang dilakukan salah satunya dengan melakukan pelaporan kepada taman nasional.

Di Bima, pada tingkat kabupaten MS melakukan Advokasi dalam bentuk, kontrak politik, kontrak komitmen Dan hearing. Ini dicontohkan masyarakat di Bumi Pajo. Mereka melakukan kontrak politik dengan calon bupati (bupati incumbent) mengharapkan perbaikan jalan agar memberikan dukungan penuh secara politik. Masyarakat tambora meminta usulan Desa Rasabou dan Oi Katupa Tambora yang pada tahun 2012 dikabulkan. Selain melakukan advokai ditingkat pengambilan keputusan (Bupati) MS/OMS mendorong keseriusan SKPD yang tergabung dalam Pokjanal (BPMDes, BPPKB, Dikes, Bappeda, Dikpora, Setda) dalam bentuk penandatanganan kontrak komitmen pemberian perhatian terhadap pelayanan publik. Selain dalam bentuk komitmen, upaya OMS di kabupaten Bima juga mendorong pada kebijakan secara legal dalam bentuk Ketetapan hukum seperti OMS di kabupaten Bima bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun RPJMD kabupaten Bima 2010-2015 dan melakukan hearing mendorong adanya perda pendidikan dengan hasil

adanya Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Yang Partisipatif.

Gerakan-gerakan masyarakat terpinggirkan dalam menuntut hak-haknya semakin baik. Dapat dicontohkan disini situasi pada masyarakat sipil Sumba Timur yang telah aktif memainkan perannya, dan dampaknya sudah mulai dirasakan terkait upaya memberdayakan masyarakat terpinggirkan. Hal ini tampak pada kasus ketika OMS melakukan komplain atas pelayanan publik yang buruk. Sebagai anggota CRC kami dapat mendorong penyedia jasa yaitu mengenai PDAM, administrasi kependudukan mengenai pengurusan KTP yang sulit dan rumit. Setelah diadakan dialog oleh CRC, Dispenduk segera membenahi sistem pelayanan. Hasilnya waktu pembuatan KTP dipercepat, jadwal pengurusan hingga penerimaan KTP lebih pasti menjadi 4 hari, biaya yang pasti dan syarat yang pasti. Hal ini sangat menghemat biaya warga untuk transport, penginapan, dan makan minum selama pengurusan KTP dan surat lainnya di kota (Dispenduk).

Perempuan semakin berdaya dalam mendorong kepentingannya secara berkelompok-kelompok. Untuk situasi MS di Sumba Barat, sejumlah praktik baik terkait upaya memberdayakan perempuan yang dapat dijadikan aset/kekuatan. Telah ada perempuan yang menduduki posisi strategis di desa contoh Kepala desa 5 orang, dan kaur desa, LPM, BPD, 2 orang dari 4 camat adalah perempuan, 6 perempuan menduduki eselon II. Perempuan mampu menggali sumberdaya dan meningkatkan kemampuan dalam mengorganisir diri dan aset lokal yang dimiliki. Para perempuan cukup aktif dalam mengembangkan tanaman toga, dapur hidup, kebun gizi, kebun contoh, dan SITORA "aksi tondaka watara"/aksi taman jagung. Selain itu, sejumlah kelompok perempuan yang sudah mampu mengelola kelompok dan membuat pembukuan keuangan, administrasi dengan baik. Hal ini memberi dampak baik bagi pengembangan ekonomi keluarga, semakin tumbuhnya kelompok-kelompok simpan pinjam untuk perempuan, dan perempuan semakin dipercaya oleh pihak lain sehingga mendapat dukungan dana untuk penguatan kelompok secara keberlanjutan.

Untuk situasi MS di Kupang sebagai berikut. Melalui pengembangan skill untuk membangun usaha kecil telah berkontribusi terhadap berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anggota kelompok dampingan Jarpuk. Dalam hal ini, kontribusi perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga melalui tenun dan usaha pengolahan bahan pangan lokal membuat suami jarang memukul istrinya, atau bisa dikatakan kekuatan ekonomi membuat posisi tawar para perempuan yang tergabung dalam kelompok-kelompok warga yang didampingi Jarpuk (salah satu OMS di Kupang) meningkat.

Lain halnya situasi MS di Sumba Timur. Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi lebih menunjukkan dampak pada partisipasi perempuan pada forum publik seperti musrenbang. Telah ada beberapa kelompok SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan). Pada awalnya mereka sendiri yang membentuk dan mendapat dorongan pula dari PNPM untuk membuka usaha. Usaha yg dilakukan bervariasi, yaitu kios, kerajinan, tenun kain, ternak kecil babi dan ayam. Pengadaan ternak besar seperti sapi, kuda dan kerbau setiap KK. Untuk Kecamatan Wulla Waijelu, setiap rumah sudah mendapat bantuan agar tidak ada lagi rumah masyarakat miskin. Upaya OMS dalam memberdayakan perempuan juga nampak dalam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berani berbicara dan terlibat dalam berbagai forum di tingkat desa hingga kabupaten/kota.

E. IMS DAN UPAYA PENCAPAIAN TKLD

Analisis mengenai capaian TKLD ini disajikan dengan maksud untuk melihat bagaimana keterkaitan hasil-hasil lokakarya IMS di 16 kabupaten dengan perubahan pada tingkat pemerintahan di daerah. Pemerintahan ini harus mempunyai arah yang baik (*good*), dan arah yang baik tersebut harus mendorong nilai demokratis di tingkat daerah. Peran utama perbaikan pemerintahan ini berada pada 3 sektor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Fungsi negara dalam hal ini mencakup fungsi pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi swasta dalam hal ini dalam hal memperkuat dari sisi perekonomian. Dan fungsi masyarakat melekat pada seluruh bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain dalam bentuk menerima pelayanan, partisipasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan konsep tersebut peran ketiga sektor tersebut menjadi penentu arah perjalanan tata pemerintahan di daerah. Salah satu yang telah dipraktikkan dalam program ACCESS Tahap II ini adalah pertautan dinamis (*critical engagement*). Pertautan dinamis sudah dipraktikkan di seluruh wilayah program ACCESS Tahap II. Meskipun demikian, potret pertautan dinamis tidak dapat secara langsung membuktikan keberhasilan program ACCESS Tahap II karena faktor-faktor lain di luar program ACCESS tentu saja masih menjadi penentu dan mempengaruhi terjadinya pertautan dinamis tersebut. Namun demikian sebagai penanda adanya perubahan yang lebih baik sudah mulai terlihat dengan adanya pertautan dinamis.

Setidaknya ada tiga aspek penting yang harus tercakup dalam desentralisasi yang demokratis, yakni *political equality*, *local accountability*, dan *local responsiveness*.¹⁰

Political equality merupakan prinsip yang memberikan kesempatan besar kepada masyarakat untuk mengekspresikan hak-hak sipil dan politiknya, seperti memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah dan pengambilan keputusan, membentuk asosiasi politik dan menggunakan hak kebebasan berbicara (*Smith, 1985:24*). Kesempatan berpartisipasi yang lebih besar bagi masyarakat dalam era desentralisasi merupakan konsekuensi logis dari perpindahan tempat pengambilan keputusan dari pemerintah nasional kepada pemerintah lokal. Kesenjangan politik antar warga ini penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena setiap orang sejatinya memiliki hak yang sama dalam hukum dan politik. Artinya, setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi setiap kebijakan berdasarkan kepada preferensinya dan juga kepentingannya, menurut rambu-rambu yang telah disepakati dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Local accountability adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada semua pihak yang terkena dampak atau yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut. Merupakan kewajiban pemerintah daerah (termasuk DPRD) mendorong terciptanya mekanisme dan sistem akuntabilitas sebagai refleksi atas keberadaannya sebagai pengemban mandat dari warga yang menjadi konstituennya maupun sebagai respon atas tuntutan pengelolaan birokrasi dengan ukuran-ukuran berbasis kinerja. Kewajiban ini antara lain mencakup mekanisme pemberian informasi dan/atau menjelaskan kinerja pemerintah daerah, baik dalam bentuk keputusan-keputusan yang dibuat dan tindakan-tindakan yang diambil kepada

¹⁰ Lihat konsep desentralisasi yang demokratis atau TKLD dalam buku Indeks Masyarakat Sipil tahun 2009. Lihat juga Laporan Penelitian Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia, Yappika, 2006

berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan informasi yang diberikan tersebut, para pemangku kepentingan mengetahui tentang apa yang telah dilakukan pemerintah sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritik, saran dan kontrol yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas mewajibkan pemerintah untuk: (1) menerima tanggungjawab atas dampak yang terjadi terhadap kehidupan rakyat; (2) bekerja sama dengan cara menyediakan informasi, melakukan proses yang transparan dan mendengarkan pandangan-pandangan masyarakat; dan (3) memberikan tanggapan yang cukup memadai terhadap pandangan-pandangan tersebut. Dengan demikian akuntabilitas mengandung arti bahwa pejabat negara dan figur-figur yang mempunyai kekuasaan lainnya bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warga. Di pihak lain anggota-anggota masyarakat yang memiliki hak tersebut bertanggungjawab pula untuk mengkomunikasikan kebutuhan dan prioritas mereka dan bekerja sama dengan yang lain dalam membangun proses untuk merealisasikan hak-hak tersebut.

Local responsiveness merupakan prinsip untuk memastikan kebijakan dan praktek desentralisasi telah membuat pemerintah daerah semakin responsif melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dasar warganegara untuk mendapatkan pelayanan (misalnya pendidikan dan kesehatan), terlibat dalam proses politik, serta mendapatkan kehidupan yang layak dan lingkungan yang sehat, guna menjamin keberlangsungan perekonomian dan kehidupan sosial dan budaya dari masyarakat setempat. Pengertian ini kadang-kadang dirujuk sebagai nilai 'kesejahteraan' (*welfare*) dari keberadaan pemerintah daerah. Prinsip ini disusun berdasarkan argumen bahwa pemerintah daerah tidak hanya harus responsif atau tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, akan tetapi kebutuhan tersebut haruslah diidentifikasi berdasarkan pengetahuan yang mendalam atas masalah-masalah lokal dan menjawab kepentingan-kepentingan masyarakat lokal. Pengetahuan masalah-masalah lokal dilihat sebagai prasyarat dari *responsiveness* dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan informasi dua arah antara pemerintah dengan rakyat yang merupakan salah satu ciri dari demokrasi (Smith, 1985: 28).

Berdasarkan konsep di atas dan dikaitkan dengan hasil refleksi fasilitator atas konsep tersebut, maka diperoleh temuan sementara yang merupakan hal-hal umum hasil IMS 2012 sebagai berikut:

1. Pengakuan Hak-Hak Politik Warga Menguat

Dialog para pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) terjadi pada seluruh kabupaten hingga level desa. Dialog ini terjadi secara intensif dan dinamis. Dalam dialog ini warga diberikan kesempatan besar mengekspresikan berbagai kepentingannya agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pada tingkat desa, seperti pada forum musrenbang, warga diundang dan diberikan kesempatan dalam menyampaikan aspirasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Salah satu contoh, forum dialog ini dimanfaatkan oleh OMS di Buton untuk melakukan advokasi pelayanan publik. Forum dialog ini di sebagian besar kabupaten bisa dinamai juga dengan Forum Lintas Aktor (FLA) atau nama lainnya. Dalam forum ini aktor-aktor MS-nya cukup eksis dan memiliki kemampuan menjadi aspirator dan inspirator dalam mendobrak kebuntuan politik di legislative dan eksekutif. sejumlah kebijakan berhasil dipengaruhi untuk lebih berpihak

kepada masyarakat kebanyakan. Keaktifan MS mempengaruhi kebijakan publik di tingkat kabupaten, unit layanan, dan desa yang menjamin partisipasi warga semakin meningkat. Warga dan organisasi warga semakin aktif mengorganisir diri dan terlibat aktif dalam proses musrenbang, perencanaan dan penggaran desa, advokasipelayanan publik, mendorong penyediaan dana sharing program, menyusun ranperda, perdes dan kebijakan lainnya.

Aspek lainnya yang nampak adalah tumbuhnya iklim yang lebih egaliter terutama dalam kancah perpolitikan lokal. Situasi politik lokal yang berkembang dinamis ini mendorong aktor-aktor daerah untuk turun ke bawah, semakin aktif untuk melakukan dialog, komunikasi dan kerja sama. Situasi ini menyebabkan adanya proses dinamis yang positif di mana para aktor semakin banyak berinteraksi dengan warga terutama di level komunitas basis. Dampaknya adalah warga semakin merasa didengar, dipercaya dan bisa terlibat dalam proses-proses kabupaten yang selama ini hanya milik elit kabupaten.

Dalam hal keterlibatan perempuan, ternyata semakin banyak perempuan terlibat untuk mengambil keputusan di desa. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis seperti kepala desa, kaur, LPM, dan lain-lain. Faktor pendorongnya adalah semakin banyak perempuan yang mendapat penguatan kapasitas dalam bentuk penyadaran kritis, pendidikan politik dan hak-hak kewarganegaraan, penyadaran hak-hak politik warga dalam konteks sosial, ekonomi dan budaya.

Hampir seluruh kabupaten mengalami peningkatan dalam hal kebebasan membentuk dan menjalankan organisasi tanpa ada hambatan dari negara. Bahkan pelibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring desa, partisipasi politik seperti pada pemilihan Kepala desa diletakkan pada peran strategis yaitu sebagai pengurus kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa warga bebas dalam menyalurkan hak politik serta proses pemilihan yang dilakukan secara terbuka.

2. Gerakan Akuntabilitas Belum Dipraktikkan Secara Massif

Upaya MS menuntut akuntabilitas pemerintah lokal ditandai oleh adanya inisiatif OMS melakukan konsolidasi bersama organisasi warga dalam rangka mendorong pelayanan publik. Selain itu aksi OMS juga mendesak akuntabilitas dengan melakukan pengawasan kebijakan anggaran (dari tingkat desa hingga kabupaten). Walaupun dalam praktiknya belum masif dilakukan dan masih sulit mengakses informasi publik (terutama dokumen-dokumen publik seperti APBD), namun hal ini menunjukkan bahwa MS telah semakin kritis merespon isu akuntabilitas pemerintah lokal dan memperjuangkan haknya atas hak atas informasi publik. Pemerintah di desa mendukung dan melaksanakan sistem informasi, namun untuk proyek-proyek pembangunan masih minim sosialisasi baik lewat papan informasi atau pun media lainnya. Gerakan masyarakat sipil menuntut akuntabilitas pemerintah lokal belum massif, namun ada beberapa contoh gerakan masyarakat sipil yang dapat dipotret melalui IMS. Salah satu contoh praktik baik terjadi di Kabupaten Muna, KRITIK bekerja sama dengan KOTM dan Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS.

Dari pengukuran IMS ditemukan pula suatu perubahan yang relatif merata di semua daerah bahwa secara umum OMS dapat mendorong proses politis yang lebih demokratis lewat pemantauan kebijakan pemerintah dan mendorong akuntabilitas lokal. Hal tersebut

ditandai oleh adanya beberapa kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah untuk melaksanakan agenda aksi kabupaten/kota. Misalnya kerja sama OMS dan institusi pemerintah dalam hal pendampingan perencanaan dan penganggaran desa partisipatif di mana pemerintah turut mendukung melalui kebijakan dan pendanaan dari APBD.

3. Daya Tanggap Lokal

Masyarakat sipil telah berkontribusi dan berhasil mendesak tanggung jawab pemerintah. Inisiatif yang berasal dari masyarakat sipil telah cukup tinggi. Belum banyak data yang menunjukkan bahwa daya tanggap itu muncul dari pemerintah baik dalam konteks pengaturan kebijakan, pelayanan publik maupun pemberdayaan warga. Meskipun upaya ke arah itu sudah dilakukan namun umumnya masih bersifat reaksioner dan belum sampai pada bentuk pelebagaan nilai-nilai *governance*/belum sampai pada perubahan sistem.

Kehadiran Forum Lintas Aktor (FLA) – atau nama lain sejenisnya – di 16 kabupaten mewarnai dinamika positif yang berkembang di kabupaten. Kehadiran FLA ternyata mampu berfungsi sebagai penggerak (*driver*) proses saling berbagi berdasarkan kemampuan dan aset masing-masing pihak dalam mendorong visi kabupaten impian. Hal ini sejalan dengan perubahan mindset terutama terkait penerapan *Appreciative Inquiry* (AI) dan *Asset Based* (AB) yang berkembang dan mulai muncul di level praktik di lapangan. Mindset ini tumbuh subur dan nampak pada dinamika yang berkembang baik di FLA.

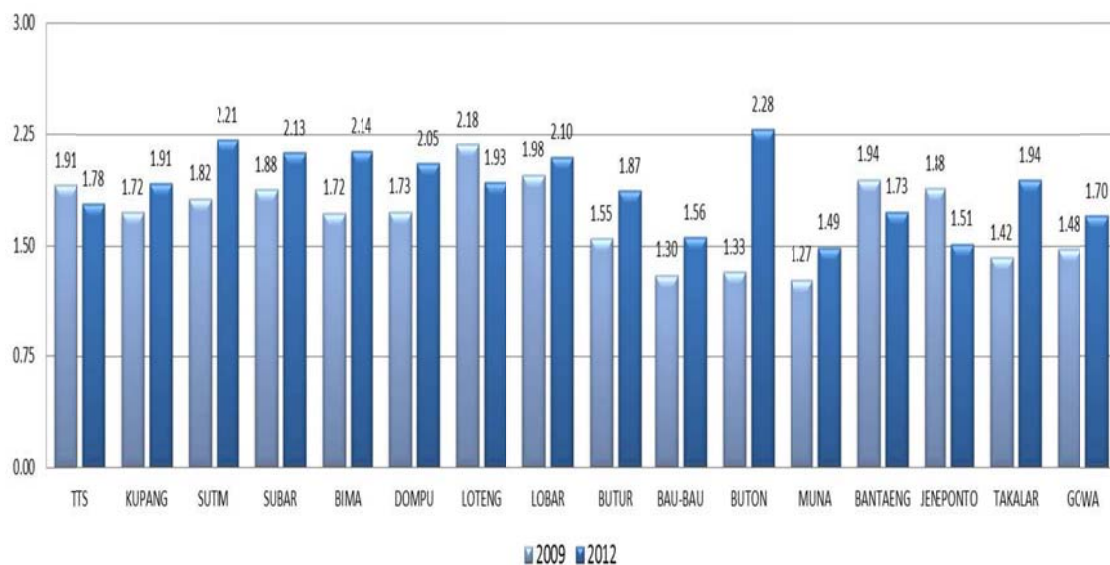
Banyak contoh yang membuktikan FLA terbukti sangat positif dalam mempererat relasi antar aktor MS. Misalnya terjadi di Kabupaten Takalar. Dalam FLA, para aktor kabupaten selalu melakukan komunikasi dan berbagai informasi setiap bulan secara rutin. Contoh baik ini juga terjadi di banyak kabupaten, antara lain, Bima, Bantaeng, dan Gowa.

Berdasarkan 3 aspek di atas terlihat bahwa partisipasi warga menguat ditandai oleh aksi-aksi yang dilakukan baik dalam hal keaktifan warga mengikuti proses pelaksanaan pembangunan, pengambilan kebijakan hingga pengawasan pelaksanaan program pembangunan. Sementara dari sisi penyelenggara negara masih terlihat reaksioner dalam menanggapi persoalan sosial ekonomi yang muncul. Oleh karena itu dorongan untuk mendorong pelebagaan partisipasi warga dan membuat mekanisme-mekanisme yang memungkinkan warga mendapat pelayanan optimal menjadi penting untuk didesak.

F. RINGKASAN ANALISIS 8 INDIKATOR YANG BERELASI DENGAN KERJA-KERJA ACCESS

1. Aksi kolektif komunitas (*collective community action*): indikator 1.1.5

Berdasarkan hasil penilaian IMS 2012, indikator 1.1.5. Aksi Kolektif Komunitas umumnya berada pada skor rentang skor 1,51-2,25 atau berada pada kategori *cukup sehat*, kecuali Kabupaten Muna, masih berada pada kondisi *kurang sehat* (1,49). Peningkatan skor terjadi pada 12 daerah yaitu Buton, Takalar, Bima, Sumba Timur, Dompu, Buton Utara, Sumba Barat, Bau-Bau, Muna, Gowa, Kupang dan Lombok Barat. Penurunan skor terjadi pada 4 daerah yaitu Jeneponto, Lombok Tengah, Bantaeng dan TTS. Gambaran tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Peningkatan pada 12 daerah ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase warga melakukan praktik baik berpartisipasi dalam kegiatan kolektif komunitas (kegiatan berkelompok secara bersama-sama) dalam bentuk menghadiri pertemuan komunitas, berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi komunitas atau usaha kolektif untuk memecahkan masalah komunitas.

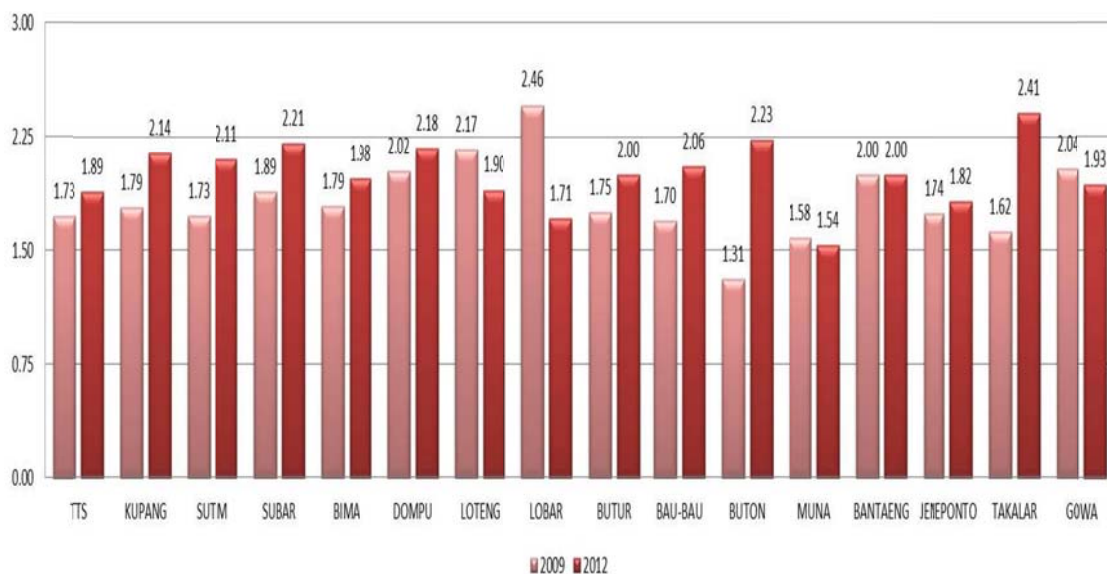
Faktor-faktor utama yang berkontribusi pada perubahan indikator aksi kolektif komunitas ini:

- Adanya pendampingan dan pengembangan Kapasitas bagi para kader desa membuat mereka semakin aktif, mampu, lebih percaya diri melakukan aksi-aksi kolektif komunitas dan terlibat aktif dalam memfasilitasi berbagai forum pertemuan di desa;
- Telah ada kesadaran warga dan organisasi warga akan penting dan manfaatnya gerakan dan aksi bersama untuk mengatasi masalah bersama;
- Telah ada gerakan membangun kapasitas untuk aksi, karena persamaan kepentingan dan isu, misalnya isu bersama dalam melakukan akses dan kontrol terhadap SDA;
- Kesadaran kritis warga sudah mulai meningkat;

- Kaum perempuan semakin kritis dan tanggap terhadap persoalan sekitarnya, misalnya pengelolaan pendidikan yang tidak adil dan kekerasan terhadap anak serta akses terhadap sumber daya air minum bersih;
- Telah ada kesadaran warga dan organisasi warga melakukan protes aksi bersama misalnya layanan air bersih, raskin dan sebagainya. Protes bersama ini ternyata mendapat respon dari pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan, dihasilkan kesepakatan bersama antar lembaga dan perbaikan layanan publik;
- Aksi kolektif terutama nampak pula dipengaruhi oleh adanya Forum Lintas Aktor (FLA). Adanya pertautan dinamis antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta, sangat bermanfaat dalam membahas persoalan bersama, menyebarkan informasi dan menggalang dukungan untuk beberapa aksi konkret komunitas dan para pihak di daerah.

2. Kerja sama antar aktor MS (co-operation): indikator 1.5.2

Hampir semua kabupaten berada pada rentang skor 1,51 - 2,25 atau berada pada kategori *cukup sehat*, kecuali Kabupaten Takalar berada pada kondisi *sehat* (2,41). Hasil perolehan skor rata-rata indikator pada masing-masing kabupaten tersaji pada diagram berikut ini:



Peningkatan signifikan terjadi di dua belas daerah yaitu Buton, Takalar, Sumba Timur, Kupang, Bau-Bau, Sumba Barat, Sumba Barat, Bau-Bau, Muna, Gowa, Kupang, dan Lombok Barat. Hal ini menunjukkan bahwa warga dan organisasi warga telah aktif mengadakan kerja sama (antara kelompok warga) dalam menggarap isu-isu umum yang menjadi prioritas bersama. Sementara penurunan skor terjadi di 4 kabupaten yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Gowa dan Muna. Walaupun terjadi penurunan, namun dapat dicatat ada beberapa aset/kekuatan yang dapat dikembangkan untuk memperbaiki kondisi kabupaten.

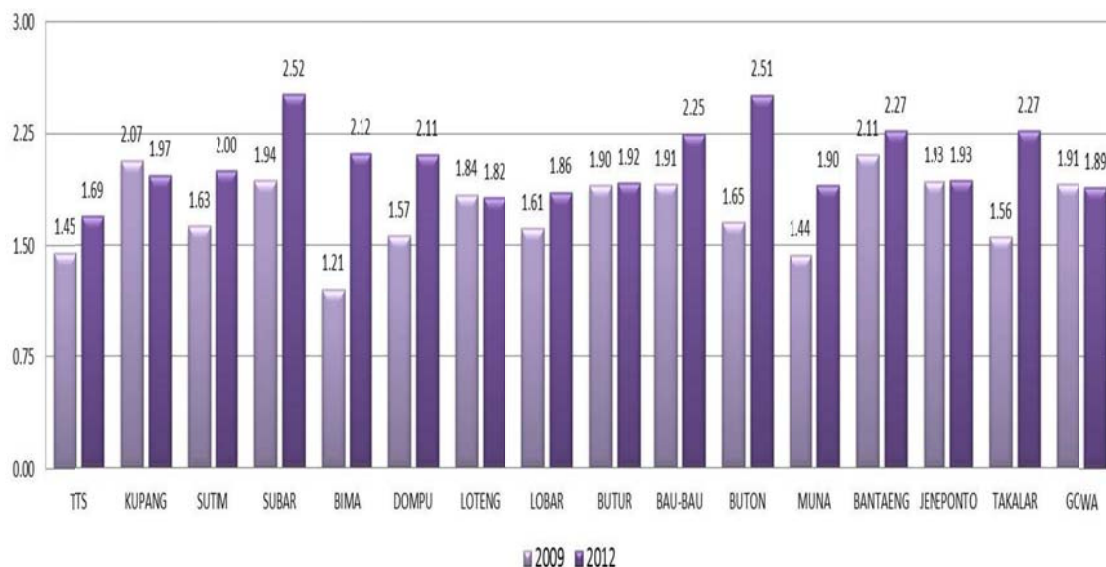
Faktor-faktor utama yang berkontribusi pada perubahan indikator kerja sama antar aktor MS sebagai berikut:

- Karena OMS memiliki kapasitas, dikenal luas, memiliki pengalaman (mengusai metode, strategi dan teknik) untuk melakukan pendampingan dan mengerjakan isu pemberdayaan

masyarakat, isu perencanaan dan penganggaran, kebijakan publik, keberlanjutan lingkungan dan sebagainya.

3. *Dialog negara dan MS (dialogue): indikator 2.6.2*

Berdasarkan penilaian IMS, dua belas daerah terlihat mengalami peningkatan. Dengan perincian, delapan daerah berada pada rentang skor 1,51– 2,25 atau berada pada kategori *cukup sehat* yaitu Bima, Dompu, Muna, Sumba Timur, Baubau, TTS, Lombok Barat, dan Buton Utara. Empat daerah berada pada kondisi *sehat* (rentang skor 2,26 – 3,00), yakni Sumba Barat (2,52), Buton (2,51), Bantaeng(2,27) dan Takalar (2,27). Terdapat 1 kabupaten pada status stagnan (tidak berubah) yaitu Kabupaten Jeneponto. Tiga kabupaten lainnya mengalami penurunan yaitu Kabupaten Kupang, Lombok Tengah, dan Gowa. Walaupun terjadi penurunan. Hasil perolehan skor rata-rata indikator pada masing-masing kabupaten tersaji pada diagram berikut ini:



Peningkatan skor di beberapa daerah menunjukkan bahwa negara (pemerintah daerah) sudah semakin terbuka dan semakin aktif berdialog dengan Masyarakat Sipil (MS). Telah ada perubahan signifikan terkait keterbukaan dan pelebagaan syarat-syarat dan aturan-aturan dialog tersebut. Selain itu negara (pemerintah daerah) semakin aktif berdialog dengan semakin banyak jenis dan ragam OMS dan telah tersedia mekanisme yang sistematis untuk dialog tersebut.

Faktor-faktor utama yang berkontribusi pada perubahan indikator dialog negara dan MS sebagai berikut:

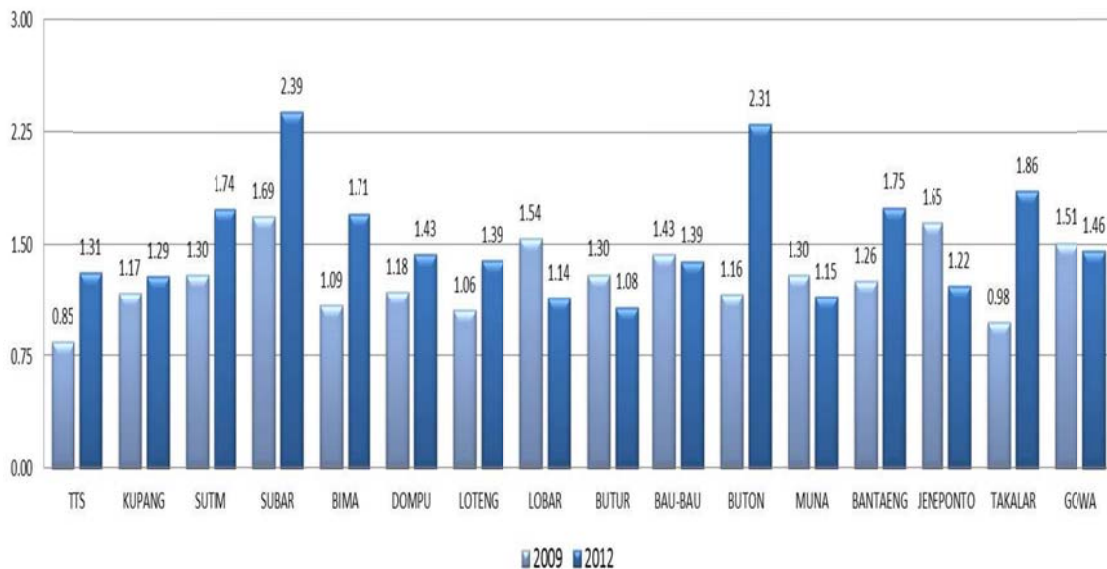
- Telah ada semangat saling berdialog, antara aktor pemerintah daerah, DPRD dengan aktor-aktor MS, karena ada isu bersama yang ingin didorong, yakni isu perencanaan penganggaran partisipatif, ADD, kemandirian desa, kemiskinan, dan perumusan kebijakan daerah/perda yang menuntut partisipasi semua pihak. Semua pihak berkomitmen untuk memperbaiki dan mendukung proses yang partisipatif, misalnya

proses perumusan perdes, pelaksanaan Musrenbang, proses perumusan perda yang partisipatif.

- Adanya kesadaran warga yang tumbuh dari bawah. Warga dan organisasi warga telah melihat bahwa pendekatan menghidupkan ruang dialog telah menjadi kebutuhan bersama karena bermanfaat untuk berbagi pengetahuan dan informasi yang meningkatkan gerak perubahan di komunitas.

4. Kerja sama (Collaboration): indikator 2.6.3

Berdasarkan hasil penilaian IMS 2012, terdapat sepuluh daerah yang masih berada pada kondisi *kurang sehat* (rentang kurang skor 0,76 - 1,51), yakni kabupaten TTS, Kupang, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Barat, Buton Utara, Bau-Bau, Muna, Jeneponto dan Gowa. Empat daerah berada pada status *cukup sehat* yaitu Sumba Timur, Bima, Bantaeng dan Takalar. Hanya dua daerah yang masuk pada status sehat yaitu Sumba Barat dan Buton. Hasil perolehan skor rata-rata indikator pada masing-masing kabupaten tersaji pada diagram berikut ini:



Situasi *kurang sehat* pada sepuluh daerah sebagaimana grafik di atas pada umumnya disebabkan oleh hanya sebagian kecil OMS dan aktor-aktor MS yang mendapatkan dukungan dari sumber daya dari pemerintah daerah. Fakta di Kabupaten Muna menunjukkan belum banyak OMS/aksi masyarakat sipil yang mendapatkan dukungan dari pemerintah. Pemerintah hanya menampung aspirasi masyarakat dan setelah itu tidak terealisasi dalam anggaran.

Dalam hal kerja sama negara dengan masyarakat sipil, Kabupaten Sumba Barat dan Buton berada dalam status *sehat*. Situasi di Sumba Barat dapat dijelaskan bahwa adanya banyak bentuk dukungan mulai dari anggaran sampai kebijakan. Dukungan tersebut di antaranya simpati dan dukungan pemerintah bagi OMS nampak oleh adanya kerjasama Pemda Sumba Barat (BPMD) dengan Yayasan Bahtera. BPMD bekerja sama dengan OMS menyelenggarakan pendampingan penyelenggaraan RPJMDes, penyusunan APBDes dan

Perdes untuk 21 desa (seluruh desa di Sumba Barat).¹¹ Pola interaksi dinamis yang saling menguntungkan, berpengaruh positif dalam membangun kerjasama merumuskan kesepakatan bersama, menunjukkan relasi antara negara dan MS semakin baik dimana warga mampu menghasilkan kesepakatan terkait pelestarian hutan dan didukung oleh pemerintah desa.¹² Selain itu, nampak oleh adanya kerjasama OMS dengan Pemda Sumba Barat yang dilakukan oleh beberapa OMS, antara lain Burung Indonesia, yakni dalam penyusunan Mulok (muatan lokal) Perlindungan Hutan dan Habitat (3 Kabupaten). Bukti kerjasama lain dapat adalah Yayasan Satu Visi, bekerjasama dengan P2KP untuk pengembangan ekonomi, konservasi lahan kering dan DAS (3 Kabupaten: Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah). Yayasan Pakta Sumba bekerjasama dengan Dishut, Bappeda Provinsi NTT untuk konservasi hutan.¹³ Kerjasama dan dukungan pemerintah bagi OMS ditandai pula oleh adanya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk penguatan kelompok/organisasi warga, seperti contoh baik alokasi anggaran Pemerintah Sumba Barat untuk mendukung Rencana Aksi mitra langsung (Kapedes dampingan Yayasan Bahtera). Total anggaran yang dialokasikan dari APBD atau APBDesa untuk mendukung program mitra sebanyak Rp. 390.782.700.-¹⁴

Kisah menarik lainnya datang dari APDes (Agen Pembaharu Desa, dampingan Yayasan Pakta Sumba). Mereka berupaya membangun jaringan dengan para pihak untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang mandiri lewat program hutan rakyat dan kebun bibit rakyat, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang mandiri lewat program hutan rakyat dan kebun bibit rakyat. Hasilnya adalah Desa Wanokasa, Kareka Nduku, Tematana, Doka Kaka, Bondotera bekerja sama dengan Dinas Kehutanan untuk program hutan rakyat, pembangunan kebun bibit rakyat. Di Bondotera mendapat dukungan kebun bibit rakyat dengan luas lahan 125 Ha. Nice dan PNPM bekerja sama dalam hal perlindungan mata air, penampungan air hujan, perbaikan jalan.

Di Buton situasi mengenai kerja sama negara dan masyarakat sipil dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemberian bantuan kambing dari Dinas Sosial kepada kelompok Petani di Desa Matanauwe oleh Dinas Sosial dan Sembako pada kelompok warga. Dukungan hand tractor dari Dinas Pertanian untuk kelompok tani serta pemberian bibit padi sawah. Bantuan bawang merah oleh dinas pertanian sebanyak 20 kg per KK berdampak pada peningkatan perekonomian warga. Dukungan PUAP (Gapoktan) hasilnya masyarakat mudah mendapatkan pinjaman modal, biaya, pendidikan dan biaya kesehatan. Pendampingan yang dilakukan oleh beberapa LSM pada program ACCESS seperti LSM Pelintas RPJMDES), Yasinta (Kader Posyandu), Prima (KTOM), Sintesa (KTN), Lsain (Mayarakat Petani), dan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).

Faktor-faktor utama yang berkontribusi pada perubahan indikator kerja sama sebagai berikut:

- Pihak negara, para aktor pemerintah daerah, DPRD telah semakin menyadari peran dan kontribusi MS dalam pemberdayaan kabupaten.

¹¹ Laporan Hasil Review Perencanaan Apresiatif Kabupaten (PAK) Kab. Sumba Barat, 18-20 April 2012, hal. 52

¹² Laporan Hasil Review Perencanaan Apresiatif Kabupaten (PAK) Kab. Sumba Barat, 18-20 April 2012, hal. 52

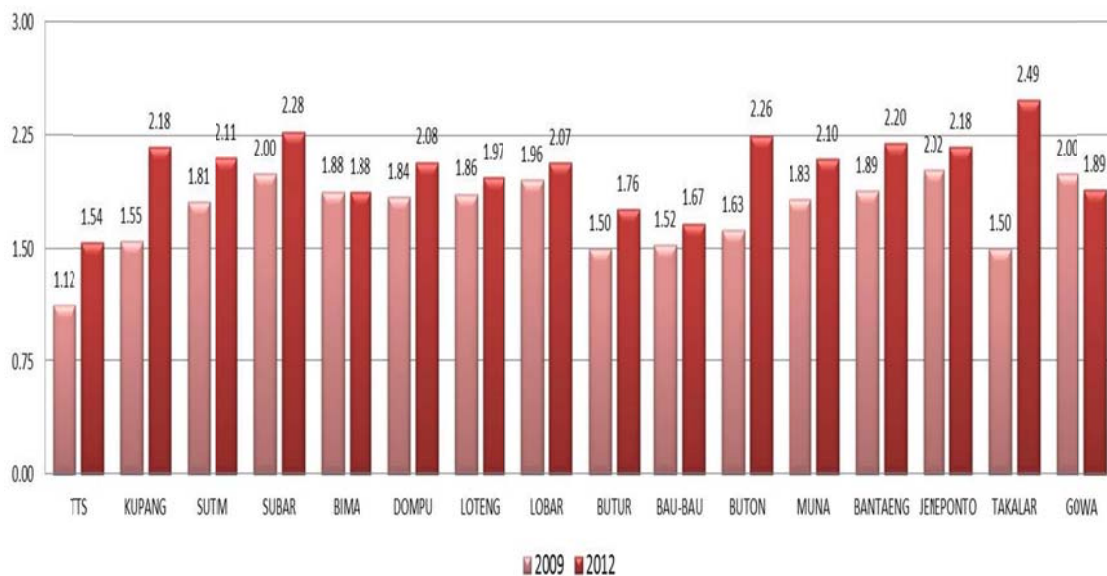
¹³ Laporan Pemetaan OMS Sumba Barat 2012, 23 – 24 Agustus 2012, hal. 13

¹⁴ Laporan PPR2 Yayasan Bahtera, 3-4 November 2010, hal. 19

- Kerja sama/dukungan ini muncul karena MS dan OMS telah menunjukkan kerja-kerja nyata dan memiliki berbagai kapasitas untuk mendukung proses pembangunan daerah. Beberapa bidang yang didukung oleh negara antara lain: perencanaan penganggaran partisipatif, pendampingan pengelolaan ADD, fasilitasi kemandirian desa, kemiskinan, dan perumusan kebijakan daerah/perda.

5. Aksi-aksi MS mempromosikan transparansi (CS actions to promote transparency): Indikator 3.2.4

Berdasarkan hasil penilaian IMS 2012, Kabupaten Gowa mengalami penurunan skor. Bima mengalami status stagnan (tidak berubah). Sementara empat belas daerah lainnya mengalami peningkatan skor. Hasil perolehan skor rata-rata indikator pada masing-masing kabupaten tersaji pada diagram berikut ini:



Peningkatan ini menunjukkan bahwa telah ditemukan semakin banyak contoh aktivitas untuk promosi transparansi yang dilakukan MS. Atau dengan kata lain, MS mulai menunjukkan perannya sebagai pendorong dalam menuntut transparansi pemerintah dan perusahaan swasta. Aktivitas MS dalam area ini mulai mendapatkan dukungan yang meluas.

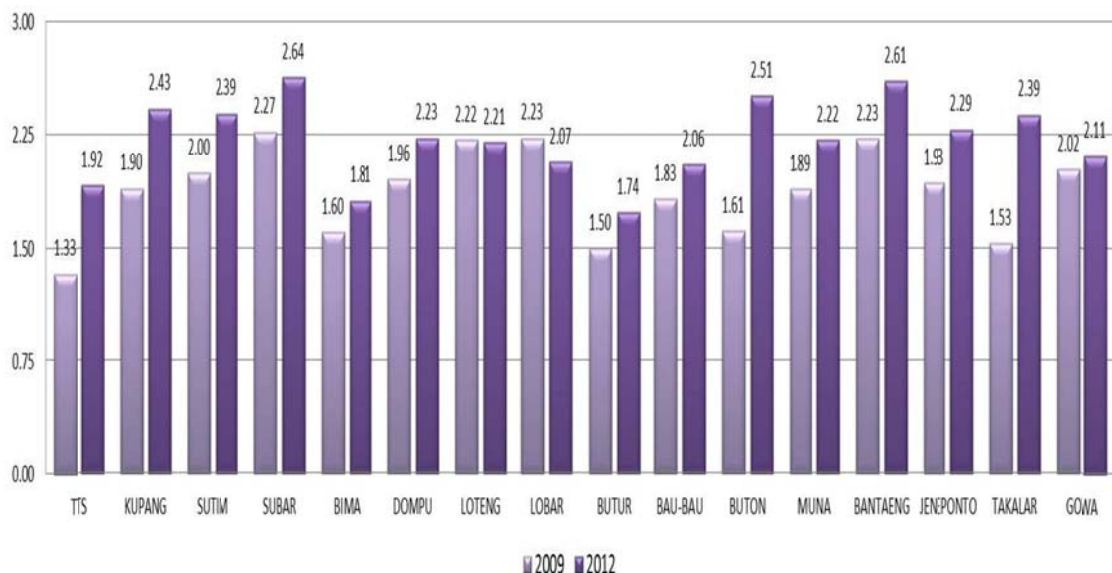
Faktor-faktor utama yang berkontribusi pada perubahan indikator aksi-aksi mempromosikan transparansi sebagai berikut:

- Adanya inisiatif OMS mengorganisir berbagai pertemuan antara warga, kelompok warga (termasuk perempuan) dengan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten untuk membicarakan mekanisme pengelolaan keuangan (ADD) yang transparan dan akuntabel.
- Aparat desa mulai tumbuh kesadarannya akan transparansi dalam bentuk penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan desa, jadwal perencanaan program tahunan desa, dan program yang turun di desa dari pemerintah dan proyek lain.
- Telah ada sejumlah aturan dan kesepakatan yang diinisiasi MS untuk menjamin pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang telah dimulai di level desa.

- Banyak kader di desa memfasilitasi warga berdasarkan panduan desain program dengan nilai *transparansi*, akuntabilitas, keadilan gender dan sosial, partisipasi.
- Mereka mempraktekkan metode *appresiative inquiry* dalam pengorganisasian dan fasilitasi.
- Aksi-aksi para kader di desa dalam mempromosikan nilai transparansi berpengaruh di tingkat desa, Pemdes sudah semakin transparan misalnya terkait pengelolaan ADD dan dana lain yang masuk di desa.

6. Aksi-aksi MS untuk mempromosikan kesetaraan gender (CS actions to promote gender equity): Indikator 3.5.3

Berdasarkan penilaian IMS 2012, hampir semua daerah mengalami peningkatan skor yang menyumbang pada perbaikan status menuju MS yang sehat, kecuali di 2 kabupaten yang mengalami penurunan skor, yakni kabupaten Lombok Barat (turun -0,16) dan Lombok Tengah (turun -0,02). Namun demikian semua daerah berada pada status *cukup sehat* dan *sehat*, dalam arti status ini menunjukkan ada perkembangan yang baik dalam indikator ini. Hasil perolehan skor rata-rata indikator pada masing-masing kabupaten tersaji pada diagram berikut ini:



Peningkatan ini menunjukkan bahwa MS semakin dapat diandalkan sebagai sebuah kekuatan pendorong untuk mempromosikan masyarakat adil gender. Aktivitas MS dalam isu ini semakin mendapatkan dukungan publik.

Faktor-faktor utama yang berkontribusi pada perubahan indikator aksi-aksi untuk mempromosikan kesetaraan gender sebagai berikut:

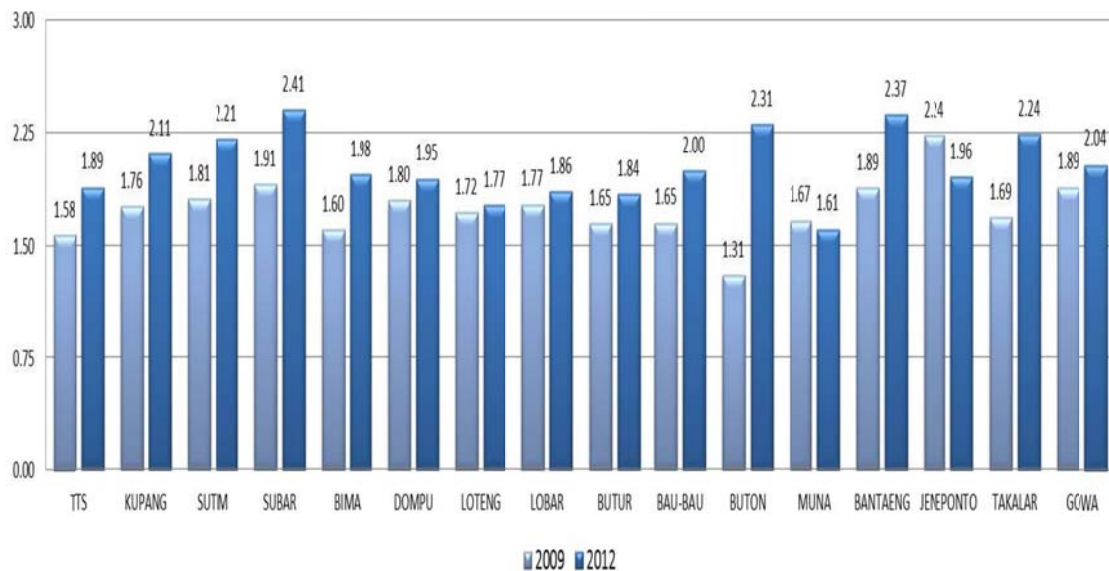
- OMS semakin aktif melakukan promosi tentang keadilan dan kesetaraan gender kepada masyarakat luas (di level desa hingga kabupaten) melalui diskusi-diskusi tematik kesetaraan gender.
- Adanya ketentuan atau kesepakatan perlunya keseimbangan pelibatan perempuan dan laki-laki dalam berbagai pertemuan, pengembangan kapasitas dan pemilihan pengurus, turut menentukan keseimbangan dari segi kuantitas. Keberpihakan ini semakin membuka ruang

dan kesempatan bagi perempuan untuk peningkatan kapasitasnya. Pada gilirannya kualitas relasi setara gender dan dialog yang bermutu juga meningkat.

- MS terus mendorong keterlibatan perempuan dalam musrenbang, baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

7. Pengaruh MS dalam kebijakan publik (*Influencing Public Policy*): indikator 4.1.1

Berdasarkan hasil penilaian IMS 2012, hampir semua daerah mengalami peningkatan skor yang menyumbang pada perbaikan status menuju MS yang sehat, kecuali di 2 kabupaten yang mengalami penurunan skor, yakni Kabupaten Jeneponto (turun -0,28) dan Muna (turun -0,06). Meskipun demikian semua daerah berada pada status cukup sehat dan sehat, artinya status indikator pengaruh MS dalam kebijakan publik dalam kondisi yang baik. Hasil perolehan skor rata-rata indikator pada masing-masing daerah tersaji pada diagram berikut ini:



Peningkatan ini menunjukkan bahwa MS telah memainkan peran cukup signifikan di area ini dan tujuan-tujuan perubahan kebijakan mulai dapat dicapai.

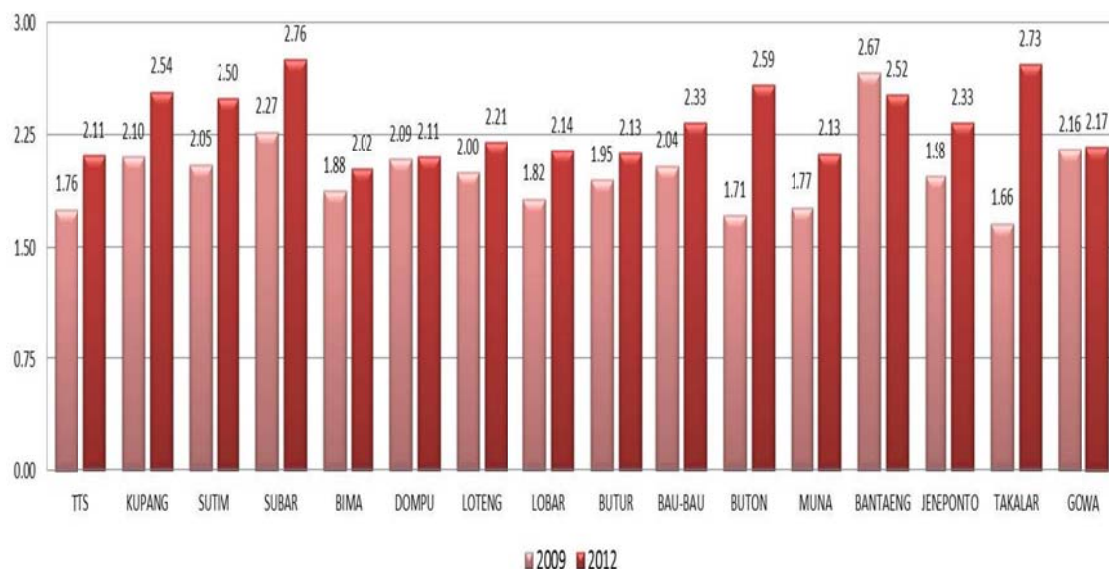
Faktor-faktor utama yang berkontribusi pada perubahan indikator pengaruh MS dalam kebijakan publik sebagai berikut:

- Aktor-aktor masyarakat sipil semakin giat memainkan peran untuk mempengaruhi kebijakan publik, mulai dari level desa hingga kabupaten. Di level desa, warga berhasil mendorong adanya kebijakan desa berupa perdes dan surat keputusan kepala desa. Di level kabupaten, OMS mendorong adanya kebijakan daerah partisipatif.
- Telah ada banyak praktik baik terkait upaya warga dan OMS mempengaruhi kebijakan publik, ditandai oleh adanya fakta bahwa semakin banyak desa telah memiliki Perdes yang umumnya didorong oleh warga dan organisasi.
- Warga dan organisasi warga semakin aktif dalam mempengaruhi kebijakan terkait rumusan indikator kemiskinan lokal, kebijakan anggaran, implementasi ADD, dan sebagainya.

- Adanya upaya OMS untuk melakukan Lobby untuk perbaikan penyediaan layanan negara/perbaikan kualitas pelayanan publik.
- Adanya berbagai pengembangan kapasitas, refleksi dan pembelajaran bagi para kader desa membuat mereka semakin mampu, kritis, dan tanggap untuk melakukan advokasi kebijakan.

8. Memberdayakan perempuan (*empowering women*): indikator 4.4.4

Berdasarkan hasil penilaian IMS 2012, hampir semua daerah mengalami peningkatan skor, kecuali Kabupaten Bantaeng yang mengalami penurunan skor (turun -0,14). Meskipun demikian semua daerah berada pada status cukup sehat dan sehat yang menunjukkan kondisi MS yang baik. Hasil perolehan skor rata-rata indikator pada masing-masing kabupaten tersaji pada diagram berikut ini:



Peningkatan skor ini menunjukkan MS telah semakin memainkan peran penting dalam pemberdayaan perempuan (memberi kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, adat, kesehatan, politik dan keamanan) dan kontrol atas hidup mereka. Selain itu, dapat ditemukan contoh-contoh kesuksesan/dampak yang signifikan.

Faktor-faktor utama yang berkontribusi pada perubahan indikator pengaruh MS dalam kebijakan publik sebagai berikut:

- Adanya kebijakan pengarusutamaan gender yang membuka pintu bagi partisipasi perempuan;
- Dalam tiga tahun terakhir ini jumlah OMS mengalami peningkatan luar biasa. Perkembangan tersebut umumnya terjadi di level komunitas dan banyak melibatkan perempuan. Hal ini berdampak pada meningkatnya ruang dan kesempatan partisipasi perempuan untuk mendapatkan lebih banyak informasi, pembelajaran, penyadaran kritis dan bermacam ragam pengembangan kapasitas;
- Telah ditemukan sejumlah bukti bahwa upaya pemberdayaan perempuan memberi dampak positif bagi perubahan di lingkup keluarga, komunitas, level desa, hingga level lebih luas;

- Banyak praktik baik yang muncul terkait advokasi kebijakan, misalnya dalam mengkritisi pelayanan publik yang buruk, menunjukkan bahwa perempuan lebih gigih, lebih vokal memperjuangkan haknya karena umumnya persoalan layanan publik lebih dekat dengan pengalaman keseharian mereka. Hal ini membuat perempuan semakin dipercaya mengisi peran penting dalam tim lobi, narasumber, negosiator dan koordinator gerakan warga;
- Adanya banyak cerita sukses yang dipromosikan terkait kesuksesan perempuan mengorganisir kelompok, mengelola administrasi dan keuangan, berdampak pada meningkatnya kepercayaan pada perempuan, bahwa mereka bisa, dan dapat diandalkan untuk perubahan.

G. REFLEKSI DAN PEMBELAJARAN PEMANFAATAN IMS

Ada dua hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang disajikan di sini. Pertama, berkaitan dengan substansi IMS sebagai *instrument* riset aksi. Kedua, IMS sebagai ruang dialog antara OMS dan stakeholder kuncinya untuk menciptakan aksi-aksi berdasarkan pada pengetahuan bersama. Kedua hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

IMS sebagai alat telah terbukti dapat menghasilkan pengetahuan yang setara pada OMS dan stakeholder kuncinya atas situasi daerahnya dan menemukan penyelesaian atas persoalan-persoalan yang dihadapi di daerahnya. Hasil-hasil IMS (sejak 2004, 2007, 2009, desiminasi dan pendampingan hingga IMS 2012) telah terbukti memberikan manfaat besar bagi perkembangan upaya menyehatkan masyarakat sipil. IMS menjadi acuan untuk mengembangkan program kegiatan, merancang agenda aksi, dan pengembangan kapasitas organisasi masyarakat sipil. Dalam proses IMS terpetakan sejumlah harapan, aset/kekuatan dan tantangan, rencana aksi dan strategi yang dibangun bersama semua aktor kabupaten untuk menjalankan agenda aksi tersebut. Banyak peserta mengakui bahwa metode IMS sangat menarik karena semua data dan informasi digali dari pengalaman peserta dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan mendiskusikan bagaimana praktek-praktek baik dikembangkan untuk pemberdayaan daerah. Dengan IMS maka aktor-aktor OMS, aktor lain memiliki dasar pijakan persepsi yang relatif sama untuk mengembangkan program aksi yang berkontribusi besar untuk peningkatan status kesehatan masyarakat sipil. Sebagai sebuah riset aksi, IMS dapat membangun dialog kritis dan konstruktif antar aktor MS dan para stakeholder kuncinya saling berbagi pengalaman dan informasi untuk dijadikan basis data dan informasi dalam menilai perkembangan status masyarakat sipil di daerah dan merancang strategi perubahan.

IMS sebagai ruang dialog antara OMS ternyata dapat mendorong aksi-aksi kolektif warga berdasarkan nilai-nilai yang demokratis. Hasil IMS membuka ruang interaksi dinamis dan dialog secara kontinyu antara OMS dan stakeholder lainnya. Sikap toleransi dan saling percaya, saling menghargai atas aksi-aksi kolektif yang dilaksanakan memberikan rasa saling percaya di antara para pihak. IMS juga memungkinkan terjadinya interaksi dan dialog konstruktif dan produktif dalam organisasi masyarakat sipil dalam mendukung aksi-aksi kolektif warga mewujudkan Tata Kepemerintahan Lokal Demokratis (TKLD).

H. REKOMENDASI

- 1) Dalam analisis di atas, interrelasi masih menjadi tantangan dalam menguatkan masyarakat sipil. Selanjutnya ditemukan pula bahwa lingkungan pendukung sebagai persemaian masyarakat sipil cenderung tidak mengalami perubahan situasi yang sangat berarti. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak (termasuk bintang perubahan) untuk memperkuat strategi konsolidasi gerakan masyarakat sipil dengan memanfaatkan skema pertautan dinamis yang telah berkembang di masing-masing daerah. Peran penting yang dapat dilakukan ACCESS dan para mitra strategisnya adalah memotret praktik-praktik baik atas aksi-aksi masyarakat sipil dengan pendekatan inovatif berdasarkan karakter lokal masing-masing daerah untuk dirajut menjadi sebuah model pembelajaran atas konsolidasi gerakan masyarakat sipil.
- 2) Pada masa *exit strategy* ACCESS, penting untuk selalu mendorong pengembangan kapasitas masyarakat sipil dalam hal penggalangan sumber dana secara mandiri sebagai penanda kemandirian masyarakat sipil.
- 3) ACCESS bersama mitra strategisnya dapat mengagas diseminasi atas peran dan kontribusi masyarakat sipil dalam bentuk penulisan mengenai “Potret Dinamika Masyarakat Sipil di 16 Daerah”, serial modul-modul konsolidasi pemberdayaan MS kabupaten/kota dengan berbagai tema dan lain sebagainya.
- 4) ACCESS dan Yappika dapat mendorong diseminasi hasil IMS 2012 yang melibatkan semua pihak terkait di setiap daerah. Hal ini diangkat dari harapan peserta IMS 2012, yang menyatakan bahwa gagasan diseminasi (sosialisasi) masih relevan dan perlu dilakukan.
- 5) Dalam hal manajemen pelaksanaan lokakarya, Yappika bekerja sama secara kelembagaan dengan mitra OMS lokal, namun kendali utama pada Yappika. Ke depan diharapkan kendali utama berada pada OMS lokal sehingga Yappika dapat lebih fokus pada materi, proses dan hasil-hasil IMS.